Cecep Suryana dkk.

SISTEM POLITIK INDONESIA

STUDI SISTEM DAN KAPABILITAS POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

BHINNEKA TUNGGAL IKA

Sistem Politik Indonesia: Studi Sistem Dan Kapabilitas Politik

H. Cecep Suryana
Dimas Taufik Saputra
Fanny Muhammad Ikhsan
Ginan Giasul Mustagisin
Haekal Rasyad
Hasby Hidayatul Hasbiyallah
Indi Augi Naufal
Keukeu Eva Fitriani

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Sistem Politik Indonesia: Studi Sistem Dan Kapabilitas Politik

Penulis :
H. Cecep Suryana
Dimas Taufik Saputra
Fanny Muhammad Ikhsan
Ginan Giasul Mustagisin
Haekal Rasyad
Hasby Hidayatul Hasbiyallah
Indi Augi Naufal
Keukeu Eva Fitriani

ISBN: 978-623-88132-2-3 (PDF)

Editor:
Asep Iwan Setiawan

Penyunting :
Khoiruddin Muchtar

Desain Sampul dan Tata Letak:
Ridwan Rustandi
Rahmat Ridwan

Penerbit:
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Redaksi:
Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jl. AH. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Bandung
Telepon : 022-7810788
Fax : 0227810788
E-mail :fdk@uinsgd.ac.id
Website : https://fdk.uinsgd.ac.id/

Cetakan pertama, Juli 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Suatu sistem politik dapat dinarasikan sebagai sesuatu yang selalu mempunyai kapabilitas didalam menghadapi realita dan rintangan terhadapnya. Dewasa kini pengejawantahan tentang apa yang benar-benar seharusnya dilakukan atau dikerjakan oleh sebuah sistem politik telah menjadi salah satu parameter ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu sistem politik.

Suatu sistem politik sudah seharusnya atau sepatutnya memiliki kapabilitas didalam menghadapi realita yang terjadi di lapangan dan tantangan terhadapnya. Pada era modernisasi saat ini pencapaian sebuah sistem politik di ditentukan dengan dari seberapa kemampuannya untuk melakukan penyelesaian dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada suatu bangsa. Atau bisa pula dikatakan lebih berorientasi pada hal yang bersifat nyata (*real*), seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, politik dan lainnya.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dicetuskan oleh Rusadi Kantaprawira {1983:163}, bahwa kapabilitas sistem politik haruslah dapat menghasilkan rumusan hubungan baru antara tuntutan dan dukungan dalam sistem politik yang bersangkutan. Transformasi dalam besaran maupun isi bentuk aliran input atau output akan sangat menentukan kemampuan sistem tertentu dalam menyelesaikan permasalahannya. Pendapat tersebut semakin menegaskan bahwa ukuran keberhasilan sebuah sistem politik dalam suatu pemerintahan akan ditentukan dari seberapa jauh pemerintahan tersebut melalui sistem politik yang ada, mampu untuk mewujudkan beberapa kapabilitas politik yang harus ada dalam sebuah pemerintahan.

Kapabilitas sistem politik dianggap sebagai sebuah parameter yang dapat mengukur pencapaian keberhasilan pada suatu negara. Dalam lingkup pembahasan ini, pemerintahan Indonesia saat ini telah banyak menghadapi berbagai tentangan serta perlawanan dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berdaulat. Hal ini dibuktikan oleh beberapa indikator kapabilitas sistem politik yang meliputi: Kapabilitas ekstratif, kapabilitas distributif, kapabilitas regulatif, kapabilitas simbolik, kapabilitas responsif, dan kapabilitas dalam negeri dan internasional.

Dewasa kini, begitu banyak elite politik bergerak melalui politik diberbagai bidang, tidak lagi hanya sekedar mempromosikan profesionalisme dalam memegang serta mengendalikan pemerintah, akan tetapi lebih menyukai terhadap pengakuan sebagai partai politik yang "kuat" namun, kemampuan yang mereka miliki untuk melakukannya tidak pernah berubah. Hasilnya, tergantung pada partai yang berada dipuncak kekuasaan, sistem politik akan berubah tergantung pada siapa penguasa yang berkuasa. Padahal didalam kenyataannya siapapun yang berkuasa, partai apapun serta golongan apapun, sistem politik Indonesia hendaklah tetap sama selama masih berlaku. Dengan demikian, proses pembangunan politik tidak dapat diganggu, tidak terpengaruh oleh penguasa, setidaknya dalam merumuskan politik dengan satu atau lain cara.

Kapabilitas sistem politik yang baik didukung oleh sumber daya manusia yang jujur, berkualitas, handal, dan mempunyai karakter yang baik. Maka permasalahan yang ada di bangsa ini akan dengan sendirinya dapat tertangani dengan cara yang benar serta akan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat. Karena ini adalah konsekuensi dari sistem politik.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu kapabilitas sistem politik merupakan hal penting yang harus dipelajari dan dipahami oleh para pelajar maupun mahasiswa sebagai masa depan negara. Dalam buku ini, penulis berusaha memberikan pemahaman yang informatif tentang keadaan kapabilitas sistem politik, sekaligus berharap dapat menjadi sumber bacaan bagi para birokrat dan mahasiswa untuk meningkatkan informasi tentang seperti apakah kapabilitas sistem politik yang harus Indonesia miliki dalam pemerintahannya.

Bandung, 20 Juni 2022

DAFTAR ISI

K ATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I KAPABILITAS 1

A. Definisi Kapabilitas 1

B. Macam-macam Kapabilitas..... 3

C. Kapabilitas Sosial..... 6

D. Kapabilitas Politik..... 7

E. Manfaat Kapabilitas 7

F. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Kapabilitas..... 8

G. Indikator-Indikator Kapabilitas..... 9

BAB II SISTEM POLITIK 12

A. Konsep Dasar Sistem 12

B. Karakteristik Sistem..... 14

C. Politik..... 16

D. Sistem Politik..... 20

E. Sistem Politik Indonesia..... 23

F. Sistem Politik Negara Maju Dan Berkembang 29

BAB III KAPABILITAS SISTEM POLITIK..... 41

A. Definisi Kapabilitas Sistem Politik..... 41

B. Bentuk-Bentuk Kapabilitas Sistem Politik Dan Kasusnya 46

BAB IV KAPABILITAS SISTEM POLITIK ORDE LAMA DAN ORDE BARU..... 53

A. Orde Lama 53

B. Orde Baru **..... 59**

DAFTAR PUSTAKA..... 71
BIOGRAFI PENULIS..... 73

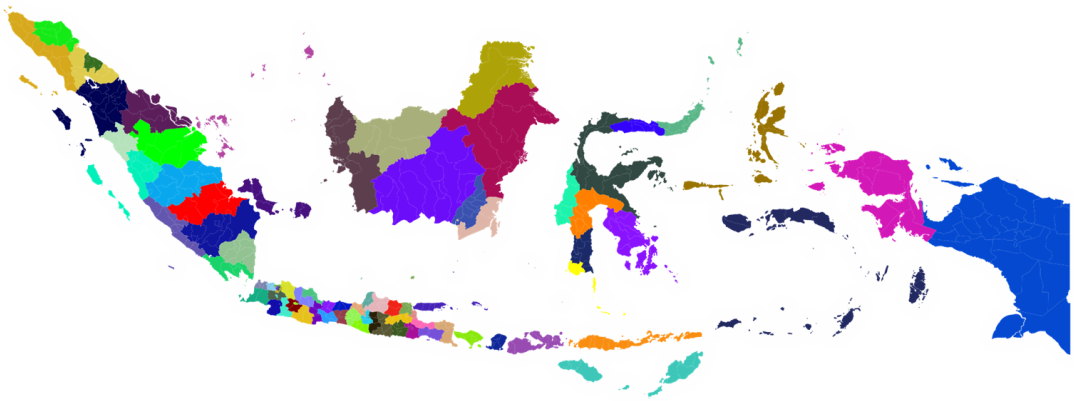

BAB I
KAPABILITAS

A. Definisi Kapabilitas

Dewasa kini, kapabilitas atau kemampuan seseorang sangat diperhatikan dalam berbagai aspek, mulai dari kemampuan dalam berbicara (public speaking), kemampuan dalam mengelola suatu organisasi, kemampuan berteknologi dan banyak hal lainnya untuk melihat kapabilitas seseorang. Kapabilitas sangat penting sekali untuk kita miliki, karena dengan kapabilitas tersebut kita mampu menguasai berbagai macam hal. Dalam 5 abad terakhir manusia, sebagai makhluk sosial, semakin percaya bahwa ia mampu meningkatkan kemampuan atau keterampilannya dengan hasil investasi dan penelitian. Ini bukan keyakinan buta, tetapi terbukti secara empiris berulang kali.

Semakin banyak hasil yang diperoleh, semakin banyak sumber daya yang dapat diinvestasikan oleh orang-orang yang paham sains dan pemerintah. Jadi mengapa kemampuan atau kapabililtas manusia sangat dihargai saat ini? Namun apa yang dimaksud dengan kapabilitas itu sendiri? Dalam bab ini kita akan menganalisi topik kapabilitas berdasarkan definisi, jenis, manfaat atau kegunaan, faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas dan indikator kapabilitas.

Kemampuan atau kapabilitas adalah konsep yang digunakan untuk mengukur dan melihat keterampilan yang ada pada seseorang atau kelompok dalam berbagai bidang kehidupan, seperti organisasi sosial, departemen, individu atau sistem. Proses ini dilihat dari pencapaian visi (goals) hingga tingkat keberhasilan. Kapasitas merupakan bentuk kemampuan yang harus dimiliki individu maupun kelompok atau pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan (Budiningsih, 2017).

Kapabilitas adalah konsep yang menggambarkan keadaan lingkungan internal dan terdiri dari dua elemen strategis: kekuatan dan kelemahan. Elemen kekuatan adalah situasi dan kapabilitas internal positif yang memungkinkan organisasi memiliki keunggulan strategis dalam mencapai tujuannya, sedangkan elemen kelemahan adalah situasi ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak mampu mencapai tujuannya. sumber daya, mereka tidak bergantung pada sumber daya lain seperti aset keuangan, teknologi dan tenaga kerja, tetapi merupakan cara yang unik dan

sangat baik untuk mengalokasikan sumber daya. Nah itulah pengertian singkat tentang kapabilitas. Untuk lebih memahami definisi kapabilitas secara lebih luas lagi, mari simak penjelasan pendapat para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Baker dan Sinkula (2005) kapabilitas adalah kumpulan keterampilan yang lebih spesifik, prosedur, dan proses yang dapat memanfaatkan sumber daya ke keunggulan kompetitif
2. Amir (2011:86) kapabilitas ialah suatu kemampuan diri untuk mengeksploitasi dengan baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta mengeksploitasi potensi diri untuk menjalankan berbagai kegiatan atau aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Umpamanya seperti ini, dalam suatu individu belum tentu seseorang mempunyai kemampuan ataupun bakat, misalnya pemain gitar bisa bermain gitar dengan begitu baik. Hal tersebut sangat ditentukan dengan bagaimana cara ia mengembangkan kemampuannya, bagaimana dengan proses latihan, dan belajarnya. Hal tersebut didukung oleh pendapat Robbin yang mengartikan bahwa kemampuan merupakan sebuah kapasitas yang dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk melakasanakan apa yang menjadi tugasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan merupakan penilaian atau ukuran dari apa yang dilakukan orang tersebut.
3. Menurut Moenir (1998:116), kapabilitas atau capability berasal dari kata dasar mampu yang mengacu pada tugas, dan kerja yang berarti mampu melakukan tugas atau pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa seperti yang diharapkan. Kapabilitas itu sendiri juga merupakan kata sifat dan kondisi yang mengacu pada sifat atau kondisi seseorang yang dapat melakukan tugas atau pekerjaan berdasarkan ketentuan yang ada.
4. Menurut Sampurno (2011:40), kapasitas merupakan seperangkat sumber daya terintegrasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan penting. Keterampilan atau skill tertanam dalam pengetahuan dan keterampilan pekerja atau individu di perusahaan atau organisasi. Kapasitas didefinisikan sebagai potensi untuk melakukan aktivitas tertentu atau serangkaian aktivitas. Terkadang istilah "kapabilitas"

digunakan untuk merujuk pada kemampuan kita untuk melakukan aktivitas fungsional, sedangkan "kapasitas" dianggap sebagai kombinasi dari keterampilan yang berbeda. Emir (2011:88).

5. Menurut Richard Bernhart, dikutip Azhar (2009:10), ia menyatakan bahwa kapasitas digunakan sebagai berikut: Untuk proses seleksi, pelatihan, pengembangan dan evaluasi. Proses penyusunan daftar kompetensi dimulai dengan melakukan analisis tugas secara komprehensif. Data hasil analisis kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok tugas, yang diberi nama dan disebut kompetensi. Upaya untuk menentukan tingkat kemahiran seseorang, serta memilih orang untuk suatu pekerjaan berdasarkan tingkat kemampuannya. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu. Mengevaluasi kinerja karyawan dengan melihat tingkat keterampilan kerja yang dibutuhkan saat ini.

B. Macam-macam Kapabilitas

Perlu kita pahami kembali, kapabilitas atau kemampuan merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur dan melihat keterampilan yang ada pada seseorang atau kelompok dalam berbagai bidang kehidupan, seperti organisasi sosial, departemen, individu atau sistem.

Setelah kita menggali pendefinisian dari kemampuan atau kapabilitas ini, dari mulai definisi secara umum sampai definisi menurut para ahli, kita mampu membuka sedikit pemahaman terhadap kapabilitas ini. Selebihnya daripada itu dengan begitu banyak definisi mengenai kapabilitas kita dapat melihat kapabilitas ini sangat luas, namun agar kita mampu lebih memahami kapabilitas ini, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai kemampuan atau kapabilitas ini.

Kapabilitas ternyata mempunyai bermacam-macam bidang diantaranya, kapabilitas bisnis, kapabilitas kepemimpinan, kapabilitas social serta kapabilitas politik. Mari kita bahas macam-macam kapabilitas ini satu per satu.

a. Kapabilitas Bisnis

Dalam usaha berbisnis, sangatlah penting bagi kita sebagai manusia untuk memiliki keahlian dalam bisnis pribadi kita, tentu saja betapa pentingnya memiliki kapabiltas bisnis bagi seorang pebisnis. Kapabilitas bisnis ini ialah kemampuan untuk menentukan kategori kompetensi, aset, dan informasi yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Seorang pebisnis harus mamu dan mempunyai kapabilitas yang kritis untuk menjalankan sebuah proyek atau industri perusahaan. Seperti halnya seorang Arsitek perusahaan misalnya, ia dapat menggunakan Kapabilitas Bisnisnya untuk menjelaskan apa yang diinginkan perusahaan secara umum guna untuk mengembangkan kebutuhannya dalam berbisnis secara menyeluruh. Metode ini digunakan untuk menyusun bagaimana strategi dan solusi TI (Teknik Industri) yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dalam bisnis tersebut.

Kapabilitas ini berisi tentang menggabungkan berbagai desain dalam teknik dan pengembangan untuk menggerakkan sistem ekonomi yang bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan. Sehingga dapat diakui ataupun tidak dalam berbisnis perusahaan dapat meningkatkan kompetensinya sehingga mampu mengelola bisnis dengan perfeksionisme.

Pemetaan Kapabilitas Bisnis memungkinkan perusahaan untuk mengobservasi dengan jelas dan teliti apa yang harus dilakukan dalam berbisnis untuk mencapai tujuan. Pemodelan Kapabilitas Bisnis adalah pandangan kritis bagi para pemimpin TI (Teknik Industri). Kebutuhan bisnis perlu membentuk arsitektur TI yang baik dan tepat. Saat perusahaan diharuskan untuk berubah, berinovasi, mereka sudah bersiap untuk bertransformasi pada era digital, berproses, dan merubah visi atau tujuan. Setelah adanya perubahan yang nyata dan banyak, teknologi pendukung pula harus dapat ditinjau kembali.

b. Kapabilitas Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kualitas yang hadir dalam diri seorang pemimpin atau seorang eksekutif. Seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki keterampilan atau kualitas yang diperlukan untuk memimpin orang lain. Kepemimpinan adalah kapabilitas seseorang untuk dapat mempengaruhi serta memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama.

Kepemimpinan mencakup proses mempengaruhi penetapan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut atau anggota untuk mencapai tujuan, dan mempengaruhi untuk meningkatkan kemampuan kelompok dan budayanya. Kapabilitas atau kemampuan seorang pemimpin harus bisa untuk menunjukkan serta meyakinkan kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan berbagai tugas, fungsi, serta wewenang ataupun tanggung jawab dalam proses mencapai tujuan melalui keterampilan metode atau sistem, sosial dan konseptual.

Selain dari pada itu, kewajiban atau peranan pemimpin adalah bagaimana pemimpin ini memberikan keteladan atau contoh yang baik dan bisa ditiru sehingga menimbulkan lingkungan yang positif bagi pengikutnya atau karyawannya, dengan menyesuaikan antara perilaku dan nilai-nilai kebersamaan, sedangkan konsisten kapabilitas seorang pemimpin adalah menyelaraskan antara perkataan beserta dengan tindakan. Adapun biasanya untuk hal kapabilitas ini berada dalam sistem politik

Dalam memimpin suatu organisasi, secara umum seorang pemimpin harus memenuhi kriteria kapabilitas kepemimpinan yang antara lain adalah:

1) menegakan ilmu/kebenaran,
2) teguh pendirian (Istiqamah),
3) memiliki kecakapan dan kemampuan (Kapasitas),
4) tidak memiliki ambisi kekuasaan,
5) taat asas (Prosedural),
6) bertindak dan bersikap adil yaitu dalam menentukan sesuatu harus sesuai dengan hukum yang berlaku,
7) hidup sederhana,
8) berakhlak mulia,
9) amanah; dan tidak munafiq,
10) mengetahui dan menghayati tugas,
11) mengenal dan mengembangkan kemampuan diri (kepribadian),
12) menjadi contoh yang baik (suri tauladan),
13) terbuka (transfaran),
14) kemampuan Komunikasi (komunikatif),

15) terlatih (learning by process),
16) menumbuhkan rasa tanggung jawab anggota terhadap organisasi,
17) bertanggung jawab penuh (full responsibility),
18) dan menggunakan organisasi sesuai dengan kepampuannya.

C. Kapabilitas Sosial

Sosial adalah sebuah kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, namun kita sulit untuk mengartikannya dan menemukan definisi yang universal. Secara umum pengertian sosial diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat. Pada dasarnya, sosial juga merupakan cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat.

Manusia disebut makhluk sosial karena tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Dari situ kita dapat mengetahui sesuatu tentang makna sosial karena berkaitan dengan interaksi antar manusia dalam masyarakat.

Para ahli sosial juga memiliki pengertian dan definisi yang berbeda dalam mengartikan kata sosial. Menurut Philip Wexler, sosial didefinisikan sebagai karakteristik dasar setiap individu manusia.

Untuk bagiannya, menurut Lewis, sosial adalah sesuatu yang dapat dicapai, diproduksi, dan ditentukan dalam proses interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintahnya.

Menurut Enda M.C. Sosial adalah cara individu berhubungan satu sama lain. Menurut Ruth Aylett, arti kata 'sosial' adalah sesuatu yang dipahami sebagai sesuatu yang berbeda, namun melekat dan terintegrasi.

Dalam klasifikasi kecakapan hidup ditemukan, yang berkaitan erat dengan hubungan sosial antar manusia. Jadi sepanjang jalan ini, kapabilitas sosial sering didefinisikan sebagai gambaran abstrak yang dapat menghubungkan komunitas dengan komunitas lain, baik secara individu maupun kelompok.

D. Kapabilitas Politik

Dalam berpolitik seseorang haruslah mengenal lebih dalam tentang berbagai macam dari mulai permasalahan, pembeda, serta apa yang menjadi keuntungan bagi masyarakat. Kapabilitas politik sangat di perlukan untuk terjun kedunia politik sebab jikalu kita tidak mempunyainya akan menjadi diri yang sesat jikalau kelompok politiknya juga sesat.

Kapabilitas politik ini diperlukan untuk menjalankan roda perpolitikan dengan baik, mengelola sistem politik dengan, membangun organisasi politik yang positif yang bermanfaat bagi masyarakat, serta tidak merugikan negara.

E. Manfaat Kapabilitas

Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan memiliki kegunaan atau manfaatnya masing-masing. Seperti udara kegunaannya atau manfaatnya agar kita bisa bernafas, seperti juga air yang berguna untuk menghilangkan dahaga kita ataupun bisa digunakan untuk membersihkan badan dengan cara salah satunya mandi, dan lain sebagainya. Pada pembahasan ini kita dikenalkan dengan istilah kapabilitas atau kemampuan.

Kapabilitas merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur dan melihat keterampilan yang ada pada seseorang atau kelompok dalam berbagai bidang kehidupan, seperti organisasi sosial, departemen, individu atau sistem. Lantas apa yang menjadi kegunaan atau manfaat dari seseorang memiliki kapabilitas?

Menurut ruky (2006:107) Sebuah standar untuk memilih pekerja serta agar dapat memenuhi arahan yang diberikan sehingga mampu mencapai tujuan atau target, dan dapat pula ditinjau dari segi keterampilan, pengetahuan dan karateristik apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan, serta perilaku seperti apa yang berpengaruh terhadap kepuasan tenaga kerja yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja. Manfaat lainnya dari kapabilitias yaitu sebagai berikut:

1. Alat seleksi karyawan; Penggunaan kapabilitas sebagai alat seleksi karyawan dalam organisasi untuk memilih calon karyawan terbaik

yaitu diharapkan adanya kejelasan perilaku dari karyawan, sasaran yang efektif, memperkecil biaya rekrukmen.

2. Memaksimalkan produktivitas; Mencapai karyawan bila dikembangkan untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilan sehingga mampu maksimal dalam bekerja. Dasar pengembangan sistem remunerasi.
3. Untuk mengembangkan sistim remunerasi akan terarah dan transparan dengan mengaitkan sebanyak mungkin keputusan dengan suatu set perilaku yang diharapkan yang ditampilkan dari seseorang karyawan.
4. Memudahkan adaptasai terhadap perubahan. Untuk menetapkan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah.
5. Menyelesaikan perilaku kerja dengan nilainilai organisasi
6. Untuk mengkomunikasikan nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi focus.

F. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Kapabilitas

Faktor adalah hal (kondisi, kejadian) yang berkontribusi (mempengaruhi) sesuatu untuk terjadi. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Minat Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan minat dalam, yang secara kasar dapat dibagi menjadi dua sumber, yaitu sumber di dalam subjek dan sumber di luar, termasuk lingkungan keluarga. lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi minat, yaitu:

1. Perbedaan pekerjaan, yaitu adanya perbedaan pekerjaan sendiri dapat tertarik pada kinerja profesional yang diinginkan, kegiatan yang dilakukan, waktu senggang dan lain-lain.
2. Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang dengan tinggi tingkat sosial ekonomi akan lebih mudah untuk mencapai tujuannya dibandingkan dengan orang yang memiliki tingkat sosial ekonomi rendah tingkat sosial ekonomi.
3. Perbedaan Hobi atau Hobi, Yaitu Bagaimana Anda Menghabiskan waktu luang Anda.

4. Perbedaan gender, artinya kepentingan perempuan akan berbeda dengan kepentingan perempuan kepentingan laki-laki.
5. Perbedaan usia, yaitu usia anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua akan memiliki kepentingan yang berbeda pada suatu objek, aktivitas, objek dan orang.

Adapun factor yang dapat mempengaruhi terhadap kemampuan atau kapabilitas, seperti yang disampaikan oleh Zwell. Menurut Zwell (2008:56- 58) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kapabilitas antara lain: Keyakinan dan nilai-nilai, keterampilan, pengalaman, karekteristik kepribadian, motivasi, isu emosional, kemapuan intelektual.

G. Indikator-Indikator Kapabilitas

Indikator merupakan konsep yang sangat penting ketika melakukan pengkajian serta penyusunan atau pembuatan penelitian ilmiah yang pada Intinya hal tersebut yang selalu ada dalam dunia akademis, baik sebagai guru maupun sebagai pelajar, dan kita pasti sudah pernah mendengar kata-kata ini.

Faktanya, indikator tidak hanya ada didalam ranah itu saja tetapi digunakan berulang kali pula pada sektor swasta, terutama ketika kita bekerja di perusahaan indikatorlah yang menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi dan menilai orang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami apa itu indikator, fungsinya dan contoh penggunaannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), indikator dapat dipahami sebagai salah satu hal yang dapat memberikan atau yang akan menjadi petunjuk atau informasi. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung harus dijadikan petunjuk dan informasi tentang suatu fenomena.

Setelah kita melihat gambaran umum serta pendefinisian dari indikator menurut KBBI, adapun pendefinisian indikator menurut para ahli:

1. Menurut World Health Organization (WHO), Indikator adalah sebuah variabel yang dapat membantu kita ketika berada dalam suatu aktivitas yang sedang memerlukan pengukuran dan evaluasi dari suatu fenomena yang terjadi. Selain dari pada itu, indikator ini pula dapat

membantu seorang peneliti dalam menilai suatu perubahan-perubahan yang sedang maupun yang belum terjadi, baik secara langsung maupun tidak terkait fenomena yang sedang diteliti.

2. Menurut Green, Indikator merupakan sekumpulan variabelvariabel yang dapat menginterpretasikan ataupun mengindikasikan kondisi tertentu kepada para peneliti. Maka dari itu, sekumpulan variabel tersebut bisa untuk digunakan sebagai alat tolak ukur suatu perubahan yang terjadi.
3. Menurut Darwin Syah, Indikator merupakan suatu tanda ataupun ciri-ciri yang mampu menunjukkan bahwa seorang siswa telah mampu memenuhi standar kompetensi yang telah diterapkan dan ditetapkan oleh pendidik atau guru. Dari Analisa diatas, subjek dari evaluasi tersebut ialah seorang siswa atau pelajar. Akan tetapi, sebenarnya subjek ini bisa memuat semua hal yang ingin kita nilai dan dievaluasi, oleh karena adanya hal tersebut, indikator evaluasi ini tidak hanya ditujukan kepada para siswa melainkan umum.

Adapun yang menjadi fungsi dari sebuah indikator, yakni:

1. Sebagai alat tolak ukur untuk menunjukkan adanya perubahan daripada nilai pada suatu fenomena atau aktivitas tertentu.
2. Sebagai pedoman atau pandangan bagi seorang peneliti untuk dapat mengukur suatu fenomena yang terjadi.
3. Sebagai pedoman atau pandangan dalam merencanakan dan merealisasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu fenomena.
4. Sebagai pedoman atau pandangan dalam usaha mengembangkan suatu kegiatan yang sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan.

Berdasarkan poin-poin yang telah tercantum diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam menentukan suatu keputusan dan membuat penilaian, perlu adanya kerangka penilaian yang jelas dan objektif. Kerangka penilaian ini tentu saja akan berisi indikasi-indikasi yang menjadi poin penting penilaian dan juga evaluasi dari suatu program ataupun kegiatan. Seperti itulah penjelasan mengenai

indikator. Kita kembali kepada pembahasan Bersama lagi, apa yang menjadi indikator dalam sebuah kapabilitas?

Menurut menon (1999), kapabilitas adalah kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki anggota organisasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dapat memberikan nilai bagi organisasi dengan indikatorindikatornya yaitu keterampilan, pengetahuan, kemampuan menerima informasi, kemampuan menyampaikan inisiatif, dan kemampuan menerima sanksi.

BAB II
SISTEM POLITIK

A. Konsep Dasar Sistem

Sebelumnya kata sistem mungkin sudah bukan hal yang baru lagi dan tentu juga kata tersebut sudah sangat familiar bukan ? Adapun pengertian dari sistem itu sendiri merupakan sebuah himpunan yang terdiri dari objek seperti bagian dan unsur namun memiliki pengertian yang tidak sama tetapi saling berhubungan, memiliki sebuah tujuan yang sama, mempengaruhi satu sama lain dan juga menjalin kerja sama yang diikat oleh sebuah rencana dengan tujuan yang sama.

Sistem menurut pamudji (1981:4) adalah sebuah lingkup atau sebuah organisasi yang sudah terorganisir, sebuah lingkup yang terhimpun membentuk sebuah desa merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau utuh.

Sistem juga dapat diartikan sebagai kerjasama suatu kelompok yang saling berkaitan secara utuh, apabila suatu bagian terganggu maka bagian yang lain akan merasakan kendalanya. Namun, apabila terjadi kerjasama maka akan tercipta hubungan yang sinergis yang kuat. Dalam sistem pemerintahan di indonesia juga jika menerapkan hal tersebut seperti sistem dari pusat, daerah, bahkan sampai ke Rt dan Rw nya jika bekerja sama akan menciptakan suatu kesatuan yang kuat. Bisa kita artikan bahwa sistem itu merupakan suatu himpunan yang terorganisir, yang dimana di dalamnya terdiri dari berbagai unsur dan bagian yang memiliki beragam perbedaan, namun tetap memiliki kesatuan yang bulat dan terorganisir.

Seperti halnya sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai unsur, apabila di dalamnya ada yang tidak sesuai atau tidak selaras nantinya tidak bisa menjalankan dengan apa yang direncanakan, jika salah satu unsurnya terkendala maka organisasi tersebut juga akan terhambat dan akan terganggu dalam menjalankan aktivitasnya. Maka sebuah sistem itu akan berfungsi jika semua partikel di dalamnya memiliki rasa saling percaya satu sama lain dan kuatnya kerja sama satu sama lain.

Sesungguhnya definisi dari sistem itu sendiri beragam tergantung penempatannya. Definisi sistem berkembang sesuai dengan konteks dimana pengertian sistem itu digunakan. Seperti halnya beberapa definisi sistem secara umum. Kumpulan dari bagian-bagian yang bekerja Bersama sama untuk mencapai tujuan yang sama, contoh:

1. Sistem tatasurya
2. Sistem pencernaan
3. Sistem Transportasi umum
4. Sistem Otomotif
5. Sistem Komputer
6. Sistem Informasi

Dengan demikian secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variable-variabel yang saling teroganisasi, saling berinteraksi dan saling bergantung sama lain.

Murdick dan Ross (1993) mendefinisikan sistem sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainya untuk suatu tujuan bersama. Sedangkan definisi sistem dalam kamus Webster's Unbriged adalah elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan atau organisasi.

Scott (1996) mengatakan sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan (input), pengolahan (processing), serta keluaran (output). Ciri pokok sistem menurut Gapspert ada empat, yaitu sistem itu beroperasi dalam suatu lingkungan, terdiri atas unsur-unsur, ditandai dengan saling berhubungan dan mempunyai satu fungsi atau tujuan utama.

Sementara Mc. Leod (1995) mendifinisikan sistem sebagai sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sumberdaya mengalir dari elemen output dan untuk menjamin prosesnya berjalan dengan baik maka dihubungkan mekanisme control.

Banyak ahli mengajukan konsep sistem dengan deskripsi yang berbeda namun pada prinsipnya hampir sama dengan konsep dasar sistem umumnya. Schronderberg (1971) dalam Suradinata (1996) secara ringkas menjelaskan bahwa sistem adalah:

1. Komponen-komponen sistem saling berhubungan satu sama lainya.

2. Suatu keseluruhan tanpa memisahkan komponen pembentukanya.
3. Bersama-sama dalam mencapai tujuan.
4. Memiliki input dan output yang dibutuhkan oleh sistem lainnya.
5. Terdapat proses yang merubah input menjadi output.
6. Menunjukan adanya entropi
7. terdapat aturan
8. Terdapat subsistem yang lebih kecil.
9. terdapat deferensiasi antar subsistem.
10. Terdapat tujuan yang sama meskipun mulainya berbeda.

B. Karakteristik Sistem

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, untuk memahami atau mengembangkan suatu sistem, maka perlu membedakan unsur-unsur dari sistem yang membentuknya. Berikut ini karakteristik sistem yang dapat membedakan suatu sistem dengan sistem lainnya.

1. Komponen Sistem (Components): Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama membentuk suatu kesatuan. Komponenkompnen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu sub sistem atau bagianbagian dari sistem. Setiap sub-sub sistem mempunyai sifat-sifat dari sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses secara keseluruhan.
2. Batasan (boundary): Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan lainnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukan ruang lingkup (Scope) dari sistem tersebut.
3. Lingkungan (environment): Lingkungan dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dengan demikian harus dijaga dan dipelihara, sedangkan lingkungan luar yang merugiakan harus ditahan dan

dikendalikan kalau tidak maka akan menggangu kelangsungan hidup dari sistem.

4. Masukan (input): Masukan sistem adalah energi yang dimasukan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (Maintenance Input) dan masukan (Signal Input). Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluarannya.
5. Keluaran (output): Sumber daya atau produk (informasi, laporan, dokumen, tampilan layer computer, barang jadi) yang disediakan untuk lingkungan sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem.
6. Komponen (component): Kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi bentuk setengah jadi (output). Komponen ini bisa merupakan subsistem dari sebuah sistem.
7. Penghubung (interface): Penghubung merupakan media penghubung antara sub sistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumbersumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran (Output) dari subsistem akan menjadi masukan (Input) pada sistem lainnya dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem lainnya membentuk satu kesatuan.
8. Penyimpanan (storage): Area yang dikuasai dan digunakan untuk penyimpanan sementara dan tetap dari informasi, energi, bahan baku dan sebagainya. Penyimpanan merupakan suatu media penyangga diantara komponen tersebut bekerja dengan berbagai tingkatan yang ada dan memungkinkan komponen yang berbeda dari berbagai data yang sama.
9. Sasaran Sistem (Objectives) atau Tujuan (Goal) Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (Goal) atau sasaran (Objektif). Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila megenai sasaran aturan tertentu.

C. Politik

Apa yang dimaksud dengan politik? Anggap saja bahwa politik itu adalah sebuah seni, jika dari seni bisa menghasilkan mahakarya yang terlihat sederhana tetapi sangat rumit maka begitu pula dengan politik. Jadi yang dimaksud politik menurut pandangan penulis merupakan sebuah seni untuk mendapatkan kekuasaan dan kekuatan.

Bukan hal yang aneh lagi jika yang namanya politik bisa menguasai bahkan bisa mengendalikan apapun, nah mari kita cari tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan politik itu sendiri? Politik umumnya merupakan sebuah bagian dari kewenangan dalam bermasyarakat dalam membentuk pengambilan sebuah keputusan, seperti pada saat pengambilan keputusan dalam negara.

Kata politik berasal dari kata Yunani polis, yang berarti negara-kota. Di negara-kota Yunani kuno, orang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kemakmuran (menurut Aristoteles) dalam kehidupan mereka. Ketika orang mencoba untuk menentukan tempat mereka dalam masyarakat, mencoba untuk mencapai kebahagiaan pribadi melalui sumber daya yang tersedia, atau mencoba mempengaruhi orang lain untuk menerima pendapat mereka, mereka tertarik pada apa yang disebut Politik.

A New Handbook of Political Science menjelaskan bahwa politik adalah penggunaan kekuatan sosial secara terbatas. Kata "kekuatan sosial" digarisbawahi untuk membedakannya dari "kekuatan individu". Hal ini karena politik berkaitan dengan pengaturan kehidupan seluruh masyarakat. Suatu masyarakat yang melegitimasi sekelompok individu untuk “kekuatan sosial”, penerapan kekuasaan “yang dapat dipaksakan” pada setiap individu untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat itu sendiri.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah definisi politik dari Gabriel A. Almond et.al., yang mendefinisikannya sebagai “kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong melalui instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa).

Politik mengacu pada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif ini—siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa.” Definisi lain dari politik pada zaman modern juga diberikan oleh Hamid bahwa “arti politik pada zaman modern meliputi pemerintahan suatu negara dan lembaga-lembaga buatan manusia lainnya dimana “pemerintah” adalah kekuasaan yang terorganisir dan menekankan pada pelembagaan kepemimpinan dan hak. untuk mendistribusikan nilai.

Politik jika dilihat dalam kepentingan secara umum merupakan sebuah usaha untuk menjalankan sebuah kepentingan yang umum berada di bawah kekuasaan sebuah Negara maupun yang ada pada kekuasan sebuah daerah. Bisa kita sederhanakan bahwa politik adalah sebuah konsep atau teknik untuk memberikan sebuah pengaruh, yang ditujukan kepada kelompok maupun individu. Biasanya dalam politik di dalamnya membahas tentang apa saya yang sedang terjadi dalam sebuah negara dan masyarakatnya, orang-orang yang menggemari atau berkecimpung dalam perpolitikan disebut dengan “Politikus”.

Dengan mengacu pada definisi politik di atas, kita dapat mengetahui apa itu tujuan politik. Berikut adalah beberapa tujuan politik umum:

1. Untuk mengusahakan agar kekuasaan dalam masyarakat dan pemerintahan dapat diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum yang berlaku
2. Untuk mengusahakan agar kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan pemerintahan dapat memperoleh, mengelola, dan melaksanakan demokrasi secara utuh.
3. Untuk mengupayakan penyelenggaraan dan pengelolaan politik dalam masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan kerangka menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Andrew Heywood, telah mengajukan setidaknya empat teori tentang "politik". Keempat asumsi ini sama-sama diyakini sebagai konteks situasi ketika kata politik disebut meskipun memiliki objek kajian yang berbeda. Keempat asumsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Politik sebagai seni pemerintahan, yaitu politik adalah pelaksanaan kontrol dalam masyarakat melalui pengambilan dan pemberdayaan

keputusan kolektif. Anggapan ini adalah yang tertua dan berasal dari Yunani kuno.

2. Politik sebagai hubungan masyarakat. Aristoteles dalam bukunya Politik menyatakan bahwa manusia adalah hewan politik. Artinya, secara kodrat, manusia hanya bisa mendapatkan kehidupan yang baik melalui komunitas politik. Kemudian, perbedaan dibuat antara ruang "publik" dan "pribadi". Kedua ranah tersebut diperluas menjadi negara (pembangunan publik) dan masyarakat sipil (pembangunan swasta). Di negara ada lembaga-lembaga, seperti pengadilan, pejabat pemerintah, polisi, tentara, sistem kesejahteraan sosial, dan sejenisnya, sedangkan di masyarakat sipil ada lembagalembaga, seperti keluarga, kekerabatan, bisnis swasta, serikat pekerja, klub, komunitas, dan sejenisnya.
3. Politik sebagai kompromi & konsensus. Sharing atau pembagian kekuasaan ialah pendapat politik sebagai kompromi & konsensus. Kompromi & konsensus dilawankan dengan pertumpahan darah, kekerasan, & brutalitas.Di dalam politik, tidak ada satu pihak yang kepentingannya terselenggarakan semuanya. Masing-masing mengurangi tuntutan suoaya tercapai persetujuan satu pihak dengan pihak lain. Politik suatu negara dianggap bagus bilamana kasus pergesekan kepentingan diselesaikan melalui kompromi & konsensus di atas “meja”, bukan dengan kekerasan atau brutalitas.
4. Politik sebagai kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan seorang atau gerombolan buat memengaruhi orang atau gerombolan lain untuk menuruti kehendaknya. Dalam konteks politik, kekuasaan yang dirujuk merupakan kekuasaan sosial, yaitu produksi, distribusi, & penggunaan asal daya suatu masyarakat. Dalam perkiraan ini, politik dipandang menjadi penggunaan “kapital” (yaitu kekuasaan) pada konteks produksi, distribusi, & penggunaan asal daya tersebut.

Jadi dari uraian yang sudah dibahas dapat disimpulkan secara singkat bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu.

Kemudian konduite politik pada rakyat pula bisa didefinisikan menjadi bentuk tanggapan rakyat terhadap sistem politik yang berlaku dalam suatu negara. Berikut ini adalah beberapa bentuk konduite politik yang terdapat pada rakyat:

1. Moderat Perilaku politik moderat biasanya ditunjukkan kelompok warga yang merasa telah relatif puas menggunakan keadaan politik yang sedang terjadi. Artinya, gerombolan warga tadi sudah berpikir maju, tetapi belum mampu mendapat perubahan secara cepat.
2. Liberal Perilaku politik liberal ditunjukkan se gerombolan rakyat yang sudah mempunyai pemikiran maju & bebas. Kelompok rakyat ini bisa mendapat & mengikuti keadaan menggunakan perubahan secara cepat & progresif demi buat mencapai tujuan eksklusif sinkron menggunakan aturan yang berlaku.
3. Konservatif Perilaku politik konservatif ditunjukkan sang gerombolan rakyat yang merasa relatif puas menggunakan keadaan politik yang sedang terjadi. Kelompok rakyat menggunakan konduite politik ini cenderung mampu bertahan pada menghadapi perubahan.
4. Status Quo Perilaku politik status quo ditunjukkan sang gerombolan warga yang merasa telah relatif puas menggunakan keadaan politik yang terjadi. Namun, gerombolan warga ini selalu berusaha buat mempertahankan keadaan yang terdapat tanpa terdapat perubahaan.
5. Radikal Perilaku politik radikal ditunjukkan oleh kelompok warga yang tidak puas dengan keadaan politik yang sedang terjadi. Secara umum, kelompok warga ini menginginkan perubahan secara mendasar, pada tempo secepat-cepatnya, & tak jarang menimbukan adanya perselisihan pada warga.

Adapun politik dalam sistem ketatanegaraan yaitu terkait dengan pemerintahan maupun kekuasaan suatu Negara. Pada dasarnya sebuah politik itu selalu berhubungan dengan yang namanya tujuan dari masyarakat, bukan atas dasar tujuan individu. Kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, politik merupakan sebuah interaksi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat untuk membuat suatu kebijakan serta keputusan yang nantinya mengikat satu sama lain demi kebaikan bersama.

Bisa kita ambil kesimpulan bahwa politik itu merupakan sebuah alat untuk mempengaruhi orang lain baik itu individu maupun kelompok. Kita bisa melihat fenomena tersebut ternyata memang benar bahwa politik itu memang bisa mempengaruhi siapapun baik itu rakyat kecil maupun rakyat yang berada, kekuatan politik bisa dikatakan kekuatan yang sangat kuat untuk mempengaruhi siapapun.

Sekarang ini di tengah krisisnya kepemimpinan dan panutan akibat dari maraknya korupsi yang terjadi, sebaiknya kita mencontoh politik yang dilakukan Rasulullah sebagaimana beliau membangun negara madinah, menyatukan perselisihan antara dua kaum muhajirin dan anshar. Ketika beliau mendapat kritik dan saran beliau akan memikirkan dengan sebaik-baiknya, dalam mengatur masyarakat beliau menerapkan nilainilai dan norma-norma masyarakat setempat yang sejalan dengan syariat islam.

Beliau berkuasa tidak hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat muslim saja tapi seluruh kalangan masyarakat baik itu muslim ataupun non muslim. Kita sebagai generasi muda calon pemimpin dimasa yang akan datang alangkah baiknya kita menerapkan sikap dan etika politik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam memerintah Madinah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, persatuan, toleransi dan persaudaraan.

D. Sistem Politik

Sistem politik merupakan sebuah mekanisme perangkat sebuah fungsi, serta memiliki peranan penting dalam politik, hal tersebut yang nantinya kan menjadi sebuah proses yang terjadi di masa lalu, sekarang, dan di masa depan yang akan datang.

Dari segi pandang ini bisa disimpulkan bahwasanya politik itu adalah sebuah sistem yang memiliki ruang lingkup yang sangat besar, bahkan terjadi dalam kehidupan yang lingkupnya kecil dan menjadi makanan sehari-hari. Berikut adalah pendapat sistem politik menurut beberapa ahli:

Menurut Rusandi Simuntapura

Sebuah sistem dalam politik merupakan sebuah perangkat yang memiliki fungsi dalam sebuah struktur politik dengan memiliki hubungan saling terikat dengan proses yang bagus.

Sistem Politik Indonesia: Studi
Sistem Dan Kapabilitas Politik

Menurut David Easton

Dia mengatakan bahwa sebuah sistem politik merupakan sebuah korelasi yang menjadi sebuah proses dalam sebuah tingkah laku bersosial yang diperuntukan secara otoritatif terhadap masyarakatnya. Sebuah sistem perpolitikan yang digunakan di negara kita merupakan sebuah sistem demokrasi bersendikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Sistem politik Indonesia bersumber dari falsafah negara pancasila adalah falsafah dasar negara Indonesia. Lima poin dasar yang saling terikat dan terhubung satu sama lain. Lima poin tersebut membimbing agar tercapainya tujuan yang menjadi dasar negara dalam menciptakan pemerintahan untuk membentengi masyarakatnya, meningkatkan kesejahteraan, kedamaian dan keadilan sosial serta membangun kehidupan negara yang memiliki intelektual dan memiliki kehidupan pada tatan dunia.

Kita bisa mencontoh dari sistem politik yang Rasulullah terapkan, beliu bahkan di akui oleh Michael H. Hart sehingga ditempatkan di posisi pertama yang berjudul “The 100: A Rangking of the Most Influential in History”. Hal tersebut didasarkan bahwa kepemimpinan Rasulullah mengacu pada menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, berkat kepemimpinan beliau saat itu masyarakat Madinah yang heterogen bisa berdampingan satu sama lain.

Lima poin dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan politik yang dijalankan oleh Rasulullah berkenaan dengan persaudaraan internal kaum muslimin antara muhajirin dan anshar, juga perjanjian antara umat muslim dan non-muslim. Meskipun pada saat itu kekuasaan di pegang umat muslim tapi Rasulullah tidak memaksa orang-orang yang berkeyakinan non-muslim untuk memeluk islam, tetapi beliau membebaskan mereka untuk memeluk agama yang dipercaya mereka.

Kepiawaian Rasulullah dalam berpolitik di antaranya:

1. Membangun infrastruktur negara dengan masjid sebagai simbol utamanya. Pembangunan masjid ini tidak hanya difungsikan sebagai ruang untuk ibadah, tetapi juga untuk ruang publik sebagai tempat bermusyawarah dalam memecahkan sebuah masalah.
2. Mempererat rasa persaudaraan satu sama lain bertujuan untuk membentuk ikatan yang baru, memperkuat keimanan dan saling

gotong royong. memanifestasikan sebuah perjanjian supaya hidup berdampingan antara satu sama lain baik itu kelompok maupun organisasi di Madinah pada saat itu, saling mendukung dan menghargai satu sama lain.

Bahkan sampai di akhir hayatnya Rasulullah mencontohkan sifat kepemimpinannya dengan demokratis, beliau tidak menunjuk siapapun sahabatnya untuk meneruskan kepemimpinannya. Beliau menyerahkan hal tersebut langsung kepada umatnya untuk memilih siapa yang akan memimpin mereka selanjutnya.

Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat adalah konsep induk sebab sistem politik hanya merupakan salah satu dari struktur yang membangun masyarakat, seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Sistem politik pun merupakan abstraksi (realitas yang diangkat ke alam konsep) seputar pendistribusian nilai di tengah masyarakat. Menurut Chilcote, pada tulisannya di The Political System, Easton membuatkan empat asumsi (asumsi dasar) tentang perlunya suatu teori umum (grand theory) sebagai cara mengungkapkan kinerja sistem politik. Chilcote menjelaskan terdiri atas :

1. Ilmu pengetahuan memerlukan konstruksi untuk menyistematisasikan fakta-fakta yang ditemukan.
2. Para pengkaji kehidupan politik harus memandang sistem politik sebagai keseluruhan, bukan parsial.
3. Riset sistem politik terdiri atas dua jenis data, yaitu data psikologis dan data situasional. Data psikologis terdiri atas karakteristik personal dan motivasi para partisipan politik. Data situasional terdiri atas semua aktivitas yang muncul akibat pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini muncul dari lingkungan fisik (topografi, geografis), lingkungan organis nonmanusia (flora, fauna), dan lingkungan sosial (rakyat, aksi dan reaksinya).
4. Sistem politik harus dianggap berada dalam suatu disequilibrium (ketidakseimbangan).

Dalam konteks bangunan keilmuan, Easton menghendaki suatu teori generik yang bisa mengakomodasi bervariasinya lembaga, fungsi, & ciri

sistem politik untuk lalu merangkum keseluruhannya pada satu penerangan generik. Proses kerja sistem politik menurut awal, proses, akhir, & pulang lagi ke awal wajib bisa dijelaskan sang satu kamera yang bisa merekam semua proses tersebut. Layaknya pandangan fungsionalis atas sistem, Easton menghendaki analisis yang dilakukan atas suatu struktur nir dilepaskan menurut fungsi yang dijalankan struktur lain.

Easton menghendaki kajian sistem politik bersifat menyeluruh, bukan parsial Easton pula memandang bahwa sistem politik tidak bisa lepas berdasarkan konteksnya. Sebab itu pengamatan atas suatu sistem politik wajib mempertimbangkan efek lingkungan. Pengaruh lingkungan ini disistematisasikan pada 2 jenis data, psikologis & situasional.

Kendatipun masih abstrak, Easton telah mengantisipasi pentingnya data dalam level individu. Namun, level ini lebih dimaksudkan dalam strata unit-unit sosial pada rakyat daripada konduite rakyat negara (seperti generik pada pendekatan behavioralisme) Easton menekankan dalam motif politik ketika suatu entitas warga melakukan aktivitas pada sistem politik. Hal yang menarik berdasarkan Easton, yaitu antisipasinya atas efek lingkungan anorganik, misalnya lokasi geografis ataupun topografi daerah yang beliau anggap memiliki efek tersendiri atas sistem politik, selain tentunya lingkungan sistem sosial (warga) pada pada ataupun luar sistem politik.

Easton juga menghendaki dilihatnya penempatan nilai pada syarat disequilibriun (ketidakseimbangan) ketidakseimbangan inilah yang merupakan bahan bakar sebagai akibatnya sistem politik bisa selalu bekerja. Dengan keempat perkiraan pada atas, Easton ingin menciptakan penerangan atas sistem politik yang tahapan-tahapannya jelas. Pertanyaan dasar kerangka pikir ini merupakan konsep-konsep apa saja yang wajib dikaji pada upaya menyebutkan kenyataan sistem politik, forum-forum apa saja yang memang mempunyai wewenang buat pengalokasian nilai pada tengah masyarakat.

E. Sistem Politik Indonesia

Sistem politik sama misalnya dengan sistem kehidupan lainnya, memiliki kekhasan, yaitu adanya integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan, & saling kebergantungan bagian-bagiannya.

Banyak definisi yang berusaha menyebutkan sistem politik Indonesia, pada antaranya menjadi berikut:

1. Sistem politik Indonesia merupakan seperangkat hubungan yang diabstraksikan menurut totalitas konduite sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan pada rakyat & negara Indonesia. Dengan pengertian tadi lingkungan intramasyarakat akan memengaruhi sistem politik Indonesia, pada antaranya merupakan landasan rohaniah bangsa, falsafah negara, doktrin politik, ideologi politik, & sistem nilai.
2. Sistem politik Indonesia merupakan deretan atau holistik aneka macam aktivitas pada negara Indonesia yang berkaitan menggunakan kepentingan generik termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi & penyusunan skala prioritasnya.
3. Sistem politik Indonesia berlaku pada Indonesia, baik semua proses yang utuh juga sebagian. Sistem politik pada Indonesia bisa memilih dalam sistem yang pernah berlaku pada Indonesia, yang sedang berlaku pada Indonesia, atau yang berlaku selama berdirinya negara Indonesia hingga sekarang.
4. Sistem politik Indonesia berfungsi sebagai prosedur yang sinkron berdasarkan dasar negara, ketentuan konstitusional pula memperhitungkan lingkungan masyarakatnya secara real.

Dalam upaya untuk mengerti sistem politik Indonesia, seperti halnya memahami sistem-sistem lain, terdapat beberapa variabel yang perlu diketahui. Variabel-variabel kunci untuk memahami sebuah sistem ialah sebagai berikut.

1. Struktur merupakan forum politik yang mempunyai keabsahan pada menjalankan fungsi sistem politik. Dalam konteks negara (sistem politik), contohnya struktur input, proses, & hasil. Struktur input bertindak selaku pemasok komoditas pada sistem politik, struktur proses bertugas memasak masukan berdasarkan struktur input, sedangkan struktur hasil bertindak selaku prosedur pengeluarannya. Hal ini seperti menggunakan organisme yang membutuhkan makanan, pencernaan, & metabolisme untuk permanen bertahan hidup.

Struktur input, proses, & hasil biasanya dijalankan oleh aktor-aktor yang bisa mengkategorikan sebagai legislatif, eksekutif, & yudikatif. Ketiga aktor ini menjalankan tugas kolektif yang diklaim sebagai pemerintah. Namun, setiap aktor yang mewakili struktur wajib mempunyai fungsi yang tidak sinkron: Tidak boleh suatu fungsi dijalankan oleh struktur yang tidak sinkron lantaran akan menyebabkan perseteruan kepentingan. Ini pun adalah dasar menurut disusunnya konsep Trias Politika (pemisahan kekuasaan) misalnya digagas para pionirnya pada kasus abad pencerahan seperti John Locke & Montesquieu.

2. Nilai merupakan komoditas primer yang didistribusikan oleh struktur-struktur pada setiap sistem politik yang wujudnya merupakan: (a) kekuasaan; (b) pendidikan atau penerangan; (c) kekayaan; (d) kesehatan; (e) keterampilan; (f) kasih sayang; (g) kejujuran & keadilan; (h) keseganan. Nilai nilai tadi diasumsikan pada syarat yang tidak merata persebarannya pada warga sebagai akibatnya memerlukan campur tangan struktur-struktur yang mempunyai kewenangan (otoritas) untuk mendistribusikannya dalam elemen-elemen masyarakat yang seharusnya menikmati. Menurut Easton, struktur ini merupakan negara & pemerintah sebagai aktornya.
3. Norma merupakan peraturan, baik tertulis juga tidak, yang mengatur rapikan interaksi antaraktor pada sistem politik. Norma ini dikodifikasi pada konstitusi (undang-undang dasar) suatu negara. Setiap konstitusi mempunyai perincian kekuasaan yang dimiliki struktur input, proses, & output. Konstitusi pula memuat prosedur pengelolaan permasalahan antaraktor politik dalam menjalankan fungsinya, & memilih aktor (sekaligus) lembaga yang mempunyai otoritas dalam menuntaskan permasalahan, Setiap negara mempunyai kebiasaan yang berlainan sebagai akibatnya konsep kebiasaan ini bisa juga dipakai menjadi parameter pada melakukan perbandingan kerja sistem politik suatu negara dengan negara lain.
4. Tujuan sistem politik, seperti halnya norma, pula terdapat pada konstitusi. Umumnya, tujuan sistem politik terdapat pada pembukaan

konstitusi suatu negara. Tujuan sistem politik Indonesia termaktub pada Pembukaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

5. Input & hasil merupakan 2 fungsi pada sistem politik yang berafiliasi erat. Apa pun hasil suatu sistem politik, akan dikembalikan dalam struktur input. Struktur input akan bereaksi terhadap hasil yang dikeluarkan, yang bila positif memunculkan dukungan atas sistem, sementara bila negatif mendampak timbul tuntutan atas sistem. Umpan balik (feedback) merupakan situasi pada sistem politik yang berhasil menghasilkan suatu keputusan ataupun tindakan yang direspons oleh struktur hasil.

Banyak faktor yang bisa memengaruhi sistem politik Indonesia, pada antaranya faktor lingkungan, sosial budaya, & syarat ekonomi suatu negara. Pengaruh tadi membangun konduite politik pada rakyat & negara, baik pemegang kekuasaan juga yang dikuasai & dikendalikan oleh kekuasaan yang ada. Oleh lantaran itu, David Easton berkata bahwa sistem politik adalah kehidupan politik yang merupakan sistem hubungan yang dipengaruhi sang fakta yang berhubungan dengan penyebaran nilai-nilai secara otoritatif pada rakyat.

Menurut pendapat Rusadi, sifat negara Indonesia memiliki unsur falsafah, gagasan, cita-cita, nilai-nilai, doktrin, atau wawasan yang inheren dalam Indonesia. Oleh lantaran itu, sistem politik Indonesia adalah sistem yang khas atau politik yang bersifat keindonesiaan yang diwarnai sang nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai proklamasi, Bhineka Tunggal Ika, & Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem politik pada Indonesia bisa diinterpretasikan, baik sebagai semua proses sejarah berdasarkan waktu berdirinya negara Indonesia hingga dewasa ini maupun hanya pada periode eksklusif berdasarkan proses perjalanan sejarah. Dalam fenomena sejarahnya, bisa dijumpai disparitas esensial sistem politik pada Indonesia berdasarkan periode yang satu ke periode yang lain, contohnya sistem politik demokrasi liberal, sistem politik demokrasi terpimpin, & sistem politik demokrasi Pancasila, sedangkan falsafah negara permanen tidak berubah.

Sejarah sistem politik pada Indonesia terdiri dari beberapa sistem politik yang pernah berlaku, yaitu menjadi berikut:

1. Orde Lama (Masa Demokrasi Terpimpin) Pada zaman demokrasi terpimpin sudah terjadi penyimpangan - penyimpangan terhadap asas kebebasan badan yudikatif misalnya yang diputuska berdasakan undang – undang dasar 1945 yaitu dengan dikeluarkannya Undang – Undang No. 19 Tahun 1964 mengenai ketentuan utama kekuasaan kehakiman, yang pada pasal 19 undang – undang itu dinyatakan : Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara & bangsa atau kepentingan warga yang mendesak, presiden bisa ikut turut campur tangan pada soal pengadilan. Di dalam penerangan generik undang undang itu dinyatakan bahwa trias politika tidak memiliki tempat sama sekali pada aturan nasional Indonesia lantaran kita berada pada revolusi, & dikatakan selanjutnya bahwa pengadilan merupakan tidak bebas berdasarkan efek kekuasaan eksekutif & kekuasaan menciptakan undang – undang. Nyatalah disini bahwa isi undang – undang itu bertentangan sekali dengan isi & jiwa undang – undang dasar 1945.

   Oleh karenanya tepatlah bahwa MPRS menjadi lembaga negara tertinggi pada sidangnya yang ke-4 diantaranya sudah mengeluarkan ketetapan MPRS No.XIX Tahun 1966, mengenai peninjauan balik produk - produk legislatif negara di luar produk MPRS yang tidak sinkron dengan undang – undang dasar 1945.sinkron menggunakan asas kebebasan badan yudikatif misalnya tercantum pada undang – undang No. 14 Tahun 1970 pasal 4 ayat tiga memilih bahwa “ segala campur tangan pada urusan peradilan oleh pihak – pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali pada hal tadi pada undang – undang dasar.
2. Orde Baru Diharapkan dengan adanya kewenangan judical review ini, dijamin tidak terulang kembali lagi penyelewengan – penyelewengan yang dilakukan oleh Ir. Soekarno dalam zaman demokrasi terpimpin. Namun rupanya pemerintah beropini lain, seperti terbukti menurut undang–undang No.14 Tahun 1970 mengenai ketentuan–ketentuan utama kekuasaan kehakiman yang menggantikan Undang – Undang

No.19 Tahun 1964. didalam pasal 26 Undang – Undang No. 14 Tahun 1970 yang mengatur hak mahkamah agung buat menguji & menyatakan tidak sah seluruh peraturan perundangan menurut taraf yang lebih rendah dari undang – undang, maka bisa ditarik konklusi bahwa panduan kita pada hal ini merupakan sesuai menggunakan pasal 130 Undang undang dasar RIS & pasal 95 Undang – Undang Dasar Sementara 1950 bahwasan nya " Undang – Undang tidak bisa di ganggu gugat".

Berarti hanya Undang – Undang Dasar & Ketetapan MPR(S) yang bisa memberi ketentuan apakah Mahkamah Agung berhak menguji undang – undang atau tidak. Tidak diklaim hak menguji ini pada Undang Undang dasar 1945 & pada ketetapan MPR(S) yang bisa mengaturnya menjadi suatu perwujudan menurut interaksi aturan antara indera perlengkapan Negara yang terdapat pada negara, berarti bahwa undang – undang ini (undang – undang utama ketentuan kehakiman) nir bisa menaruh pada mahkamah agung wewenang hak menguji, apalagi secara materiil undang – undang terhadap undang – undang dasar. Hanya undang – undang dasar ataupun ketetapan MPR(S) yang bisa menaruh ketentuan.

3. Masa Reformasi Kekuasaan kehakiman pada Indonesia mengalami cukup banyak perubahan semenjak zaman reformasi. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dalam tanggal 10 November 2001, tentang bab kekuasaan kehakiman BAB IX memuat beberapa perubahan (Pasal 24A, 24B, 24C) amandemen mengungkapkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah agung & Mahkamah Konstitusi. Mahkamah agung bertugas buat menguji peraturan perundangan dibawah UU terhadap UU. Sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang menguji UU terhadap UUD45.
    a) Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk :
    1) Mengadili dalam taraf pertama & terakhir yang keputusannya bersifat final untuk :

4. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Judicial Review)
5. tetapkan konkurensi wewenang lembaga Negara
6. tetapkan pembubaran partai politk
7. tetapkan perselisihan mengenai pemilihan umum
    a) Membuat putusan pemakzulan (impeachment) presiden atau wakil presieden atas permintaan DPR lantaran mengerjakan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap Negara (state), korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela
    b) Mahkamah Agung (MA) Kewenangannya adalah menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada dilingkunan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha Negara. MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Calon hakim diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung, Hakim agung dipilih berdasarkan kualitasnya.

        Keputusan mahkamah agung terlepas dari kekuasaan eksekutif. Mahkamah agung bisa Memberikan putusan pemakzulan (impeachment) presiden dan/atau wakil presieden aras permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela. kedudukan yudikatif, eksekutif, legislatif sama, jadi peran yudikatif tidak bisa dipengaruhi oleh eksekutif atau legislatif, yudikatif berdiri sendiri.

F. Sistem Politik Negara Maju Dan Berkembang

Sistem politik negara merupakan sebuah sub dari sistem yang berasar dari sistem sosial. Di Indonesia sendiri penggunaan sistem negaranya adalah dengan menggunakan sistem negara demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang dasar.

Tentunya ada beberapa perbedaan dalam penggunaan sistem politik yang berada pada negara maju dan negara yang masih berkembang. Penggunaan sistem politik di negara-negara yang maju menggunakan saran dan prasaranya lebih maju dikerenakan negara yang maju memeilii sebuah kedisiplinan yang sangat tinggi, sedangkan sistem politik di negara berkembang biasanya dalam penggunaan teknologinya cenderung kurang canggih di banding di negera-negara maju, kesadaran masyarakatnya kurang terhadap seberapa pentingnya peratutan yang telah di tetapkan dan juga cenderung lebih malas.

Negara maju merupakan sebuah negara yang memilki sebuah tingkat kematian dan kelahirannya yang stabil, dengan penggunaan-penggunaan teknologi yang canggih dan berkembang, standar dalam prekonomian dan taraf kehidupannya yang stabil dan kehidupan masyarakat di negaranya sangat maju, pembangunan-pembanguna fisik dan non fisik yang bisa dikatakan selalu berhasil di jalankan.

Sedangkan negara berkembang sebuah negara yang baiasanya di dalam negara tersebut merupakan tingkatan dari menengah kebawah, dalam taraf perekonomian yang cenderung masih dalam sebuah tahap dan tingkatan terus berkembang untuk lebih maju, sedangkan Sumber Daya Alam dan Sumber daya manusianya masih sangat sederhana dari mulai taraf pendidikan yang ditempuh pun masuh sangat minim.

Karakteristik Negara Maju dan Berkembang Adapun yang menajdi pembeda diantara keduanya mempucai karakteristik yang berdebda.

1. Karakteristik Negara Maju:
    a. Kemampuan dari sisi teknologinya yang berjalan semakin canggih dan merata, yang membantu mempermudah negaranya dalam melakukan apapun serta menjadi salah satu sarana dalam menghadpi persaiangan yang sedang terjadi.
    b. Sumberdaya Manusianya sangat tinggi dan memiliki produktivitas yang sangat tinggi.
    c. Memiliki banyak kenalan sebagi mitra dan juga memiliki sebuah sistem pemasaran yang berkembang sangat pesat.
    d. Pendapatan perkapita dari negara maju biasanya sangat tinggi.

2. Karakteristik Negara Maju:
    a) Kurangnya akases dan penanganan dalam masalah kesehatan sehingga menyenbabkan kurangnya angka harapan kehidupan.
    b) Pendidikan yang kurang memadai bagi masyarakkatnya, yang menyebabkan menurunnya perkembangan pengetahuan dan perkembangan skill terhadap generasi muda.
    c) Rendahnya angka pendapatan yang di hasilkan disebabkan oleh kualitas pendidikan yang kurang memadai.
    d) Memiliki jumlah angaka kelahiran yang sangat tinggi.

3. Sistem Politik Negara Maju

Dalam sistem politik negara maju memiliki beberapa corak dan sistem yang berbeda-beda diantaranya.

a. Sistem Politik Negara-negara Eropa barat Adapun sistem politik yang di gunakan di inggris adallah sistem politik dengan menganut pada demokrasi sistem parlementer liberalistik, yang mendasarkan dan mengutamakan kepada kebebasan indivisu dengan sebebasnya dan seluasnya. Sistem politik yang di terapkan di Inggris tersebut kemudian banyak di terapkan oleh negara-negara yang ada di eropa sana.

    Sistem politik yang berlambangkan sebuah kesatuan dan persatuan pada raja dan ratu yang selalu di bangga-banggakan. Mempertahakan adat dan tradisi yang diamana pemerintahannya tersebut dijalankan oleh seorang perdana mentri yang partainya memenagkan suara pada saat pemilu dilaksanakan pada saat proses pemilihan umum, tetapi di sampai itu ada partai oposisi yang nanntinya mempunyai peran sebagi partai pendamping. Mereka berkeja untuk raja dan ratunya.

    Banyak partai yang memperebutkan kekeuatan dalam parlemen yang di antanya partai konservatif dan partai buruh. Dalam sistem politik di inggris terdapat dua kamar yang di sebut dengan House Of Commons yang diamana di pimpin dan

diketuai oleh perdana mentri dan satu kara lainnya yaitu House Of Lords. Negara yang dikenal sebagi negara induknya parlemen ini memiliki sebuah sistem kerajaan yang menganut faham liberal.

b. Sistem politik Uni Soviet dan Negara-negar Eropa Timur

Pada negara Eropa Timur dikenal dengan sistem pemerintahannya yang komunis atau disebut juga poletaris. Komunisme yang muncul di unisoviet berasal dari sebuha hasil revolusi yang meruntuhkan Tsar yang sudah memiliki kejayaan selama ratusan tahun lamanya.

Dalam sistem ini tentunya ditunjukkan untuk kemakmuran terhadp rakyatnya sehingga pada akhirnya menjadi sebuah kekuassaan yang mutlak yaitu deisebut dengan partai komunis. Paham komunis sendiri menghapus hak individu dan mengutakan sebuah kepentingan yang kolektif, yang kemudian dikenal sebagai diktaktor proletariat.

Lembaga tertingginya adalah Supreme Soviet yang memiliki masing-masingnya dua kamar dan memilki keseimbangan kekuasaan. Kamar yang pertama yaitu Sofiet Of The Union, dan yang kedua Soviet Of The Nationalities. Kemudian juga terbentuk sebuah dua presidium yang diaman ketuanya tersebut menjadi seorang presiden Rusia, memiliki sebuah prinsif kolektif yang diaman satu orang menajdi ketua, satu orang menjadi wakil ketua di tamabh dengan wakil ketua yang lainnya yang dima 15 orang ara ketua Soviet tertinngi dipilih, satu orang sebagai sekertaria, dan dua puluh satu orang yang menjadi anggotanya. Setelah runtuhnya Uni Soviet republiknya masing masing terhmpun dalam sebuah persatuan yang di beri nama Commontwealth Of Independent Srates.

c. Sistem Politik Amerika Serikat

Negera dengan federal yang diaman terdiri dari negar-negara yang terpisah dari negara induknya, negara-negara yang mempunyai undang-undangnya sendiri. satu-satunya negara

yang menjalankan trias politica secara konsekuen adalah negara Amerika Serikat. Yang diamana adanya pemisahan antara legislative, eksekutif, dan yudikatif. Pemilihan presiden yang langsung di pilih oleh rakyatnya yang disebut sebgai kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif yang prosesnya melalui sebuah keputusan kongres, sedangkan Mahkamah Agung melakukan putusan terhadap kekuasaan yudikatif. Negara-negara tersebut diharuskan dalam sebuah bentuk dalam sebuah republic yang dilarang bertentangan dengan konstitusi.

d. Sistem Politik Prancis

Di negara prancis sistem politiknya ada yang disebut dengan republic negara dan republik kesatuan. Kedudukan dari seorang presiden bisa dikatakan sangat kuat meskipun dewan materi yang memimpinnya adalah perdana mentri tetapi tetep saja presiden yang memiliki kekuasaan terkuat, karena perdana mentri tersebut diangkat oleh presiden itu sendiri. Ketua siding cabinet juga dipimpin oleh presiden, kedudukan yang dimiliki oleh cabinet juga bisa dikatakan kuat karena cabinet bisa menurunkan kedudukan seorang perdana mentri dengan mengajukan mosi tidak percaya, namun cabinet sendiri tidak bisa sampai menjatuhkan seorang presiden dan presiden juga tidak akan bisa membubarkan parlemen tersebut. Presiden adalah sebuah protector dari yang namanya arbiter ketika sebuah permasalahanpermasalahan itu muncul.

e. Sistem Politik Jepang

Di jepang sistem politiknya yang diaman sebuah kabinetnya dipimpin oleh seorang perdana mentri, memimpin juga partai manoritas yang berada pada partai majelis rendah atau disebut shuugin, juga memeliki tanggung jawab terhadap parlemen yang bernama kokkai.

Jika sudah tidak mendapatkan lagi sebuah kepercayaan dari majelis rendah maka seorang perdana mentri dan kabinetnya diharuskan untuk melepaskan jabatannya.

Parlemen di jepang ini memiliki dua majelis yang dimana disebut dengan shuugin (majelis rendah) dan majelis yang kedua yaitu sangiin (majelis tinggi).

Majelis tinggi adalah perwakilan rakyat yang mewakili semua masyarakat yang ada di jepang (sebelum perang dunia kedua) yang di dalamnya hanya terdiri dari para kaum bangsawan yang mempunyai kedudukan untuk menangguhkan sebuah Undang-undang. Sedangkan majelis rendah merupakan pemegang dari kekuasaan regislatif, pemilihan anggotanya dilakukan empat tahun sekali, tapi sewaktu waktu bisa dibubarkan lebih awal dari tenggat waktu yang telah ditentukan. Sedangkan kekuasaan yudikatifnya sendiri di serahkan pada Mahkamah Agung yang diamana badan perasilannya berdiri berdasarkan Undang-undang.

4. Sistem Politik Negara Berkembang

Dalam sistem politik negara maju memiliki beberapa corak dan sistem yang berbeda-beda diantaranya :

a. Malaysia

Malaysia adalah negara yang menganut sistem konstitusi-monarki, atau disebut raja berpelembagaan. Sebagaimana diterakan dalam konstitusi bahwa pemimpin tertinggi adalah Raja Agong. Raja tidak hanya mengatur negara dengan nasehat perdana menteri, tetapi juga menjadi pelindung agama. Sampai di sini, persoalan hubungan negara dan agama tampak terang benderang, namun ternyata dalam praktik hubungan keduanya jauh lebih rumit. Ini tentu saja sebagian berkait dengan sistem undang-undang negara bagian, yang disebut dengan undang-undang tubuh negeri, yang mengandaikan kekuasaan otonomi dalam pengurusan politik dan keagamaan.

Demikian pula, persaingan internal Melayu yang berada di UMNO (United Malay National Organization) dan PAS (Partai Islam se-Malaysia) tentang klaim negara Islam.

Jika merujuk pada sejarah sebelum kemerdekaan, negeri-negeri di Semenanjung merupakan daerah-daerah yang mandiri yang dipimpin oleh sultan.

Untuk mengatur kehidupan masyarakat, hukum yang dijadikan pedoman adalah syari'ah. Namun, setelah negara ini merdeka, dasar-dasar negara pun mengalami perubahan, yaitu undang-undang sipil dan sistem pemerintahan buatan Inggeris menjadi acuan utama, yang merupakan hasil dari komisi Reid. Meskipun aturan syari'ah tetap diberlakukan, namun hanya terbatas pada hukum pribadi dan keluarga. Dari sini, perdebatan tentang status Malaysia menyeruak ke permukaan. Gugatan penggiat politik PAS mewarnai percaturan politik, bahwa tanpa penerapan syariah secara utuh, Malaysia tidak bisa dianggap sebagai negara Islam.

b. Thailand

Thailand memiliki Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional Kendati Monarki Konstitusional, Thailand menganut trias politika dalam mana ada pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sepanjang 1932 - 2006, Thailand sekurangnya punya 16 macam konstitusi dan dilanda 20 kali kudeta militer. Monarki Absolut Thailand dihapus sejak tahun 10 Desember 1932, hari konstitusi Thailand. Monark Thailand menjalankan fungsi legislatif lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet, dan yudikatif lewat peradilan.

Namun, Monark tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintahan sehari-hari. Ada Dewan Negara Thailand, beranggota 18 orang yang diangkat Monark, yang fungsinya memberi nasehat berdasarkan permintaan Monark. Menterimenteri dalam kabinet Thailand diangkat oleh Monark tetapi bertanggung jawab kepada Rathasapha. Thailand menganut Sistem pemerintahan. Parlementer Monark sebagai Kepala Negara, Perdana Menteri sebagai Kepala Administratif,

Pemerintahan.Parlemen, Bikameral (Sapha Phuthaen Ratsadon/House of Representatives Wuthisapha/Senate). Sapha Phuthaen Ratsadon dan Wuthisapha merupakan unsur parlemen Thailand (Rathasapha) Sapha Phuthaen Ratsadon terdiri atas 500 anggota untuk masa jabatan 4 tahun. 100 orang dipilih lewat sistem proporsional dengan varian Party List (dari parpol), sementara 400 dengan sistem mayoritas dengan varian First-Past-The-Post (dari parpol).

Fungsi utamanya menginisiasi dan memberi persetujuan RUU, merancang anggaran, memilih Perdana Menteri dari antara anggota parlemen, memberhentikan menteri, memonitor administrasi negara, serta bersama Wuthisapha memutuskan masalah-masalah substansial negara seperti masalah konstitusi, prosedur pemerintahan yang penting, deklarasi perang dan damai, serta meratifikasi perjanjian internasional.

c. Sistem Politik Turki

Menurut Duran & Nebi Miş, Eksekutif presidensi dapat dianggap sebagai mahakarya konsiliasi tercapai di teater politik Turki setelah upaya kudeta FETÖ gagal pada 15 Juli 2016. Tampaknya ada dua poin penting dalam draft mengenai sistem pemerintahan yang prospektif, yaitu eksekutif presidensi.

Yang pertama melibatkan beberapa pengaturan unik dalam pemilihan presiden sistem yang memastikan bahwa krisis politik masa lalu tidak akan pernah dialami lagi. Yang kedua adalah bahwa arsitektur paket amandemen diperiksa dalam sistem pemerintahan presidensial di negara lain dan mendengar terkait rekomendasi yang dapat menyelesaikan krisis terkait sistem di negara-negara ini. Di dalam hal ini, model pemerintahan yang akan hadir di Turki dirasionalisasikan kepada sistem presidensial. Dalam paket amandemen konstitusi, sistem pemerintahan yang baru disebut

"Eksekutif Presidensi" (Cumhurbaşkanlığı Sistemi). Sistem tersebut merupakan sistem yang telah diusulkan serta dibuat berdasarkan model pemerintahan dengan seorang presiden yang disandarkan kepada pengaturan hubungan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Dalam upaya mencari sistem pemerintahan yang diinginkan, presidensi yang merupakan bagian daripada badan eksekutif mengemukakan desain ulang konstitusi dengan touch-up antara lain di pemilihan badan eksekutif, legislatif dan yudikatif; tugas badan eksekutif; metode pembaruan pemilihan; peraturan tentang 29 peradilan; prosedur penyelidikan dan persidangan untuk presiden, menteri, dan wakil presiden; kekuatan perintah eksekutif presiden; dan persetujuan anggaran. Menyusul rekonsiliasi antara Partai AK dan MHP untuk sistem presidensial dari pemerintah, Partai AK menyiapkan rancangan paket untuk amandemen konstitusi, dibagikan dan merevisinya dengan MHP serta memperkenalkannya kepada Majelis Agung (TBMM).

Majelis dan Presiden Recep Tayyip Erdogan menyetujui paket yang tertunda suara populer pada 16 April 2017. Dalam hal ini, Turki segera mengakhiri krisis Turki sistem parlementer yang telah diperdebatkan empat puluh tahun terakhir. Presidensi eksekutif tampaknya telah muncul sebagai upaya puncak Partai AK bertahun-tahun, namun pada prinsipnya dibentuk atas rekonsiliasi kedua belah pihak. Oleh karena itu, versi final tidak mencerminkan pandangan masing-masing yang terlibat pihak secara keseluruhan. Pembukaan mukadimah umum juga menggaris bawahi bahwa sistem yang terdapat di pemerintahan gagal mempertahankan stabilitas dan hasil untuk pengawasan birokrasi pemerintah serta masalah seperti itu hanya dapat diselesaikan oleh penagadopsian sistem pemerintahan baru.

Masa jabatan untuk parlemen dan presiden akan menjadi lima tahun, dan pemilihan presiden akan diadakan secara bersamaan dengan pemilihan parlemen. Dengan pengecualian undang-undang anggaran, hak inisiatif untuk undang-undang hanya diberikan kepada perwakilan. Jika terjadi kebuntuan dalam sistem, presiden dan legislatif diberikan wewenang untuk memutuskan bersama atau independen untuk pembaruan serentak dari presiden dan pemilihan parlemen. 30 Pada 20 Desember 2016, Partai AK mengajukan amandemen paket ke Komisi Konstitusi Parlemen. Serta mengikuti diskusi dan musyawarah panas, Komisi mempersempit jumlah artikel dari 21 hingga 18 dan menyetujui paket pada 29 Desember 2016.

Ketentuan yang diusulkan untuk memperkenalkan wakil pengganti di versi pertama konsep telah dihapus sebagai jumlah Majelis Hakim dan Anggota Jaksa Penuntut (HSYK) ditingkatkan menjadi 13 dengan dimasukkannya wakil menteri Departemen Kehakiman. Kondisi "menjadi warga negara Turki yang lahir alami" digantikan oleh "menjadi warga negara Turki," dan wakil presiden dan menteri mengambil mereka sumpah pada Majelis Agung ditambahkan ke draft. Dibawah bagian berjudul "Administrasi Pusat" Pasal 126 dalam Konstitusi, otoritas diberikan kepada presiden untuk formasi badan administrasi pusat dan daerah oleh mengeluarkan perintah eksekutif juga dihapus dari draft.

Selanjutnya ruang lingkup artikel yang diusulkan menyatakan bahwa presiden harus mewakili panglima Turki Angkatan Bersenjata (TSK) diperluas setelah sebuah modifikasi yang dibuat dalam Konstitusi Parlemen Komisi; sesuai dengan itu, klausul “presiden akan menggunakan wewenang ini atas nama Majelis Agung” dimuat kedalam artikel. Majelis Agung memulai pembahasan tentang usulan

tersebut artikel selama sesi pleno pada 9 Januari 2017. Diskusi berakhir di yang kedua setengah Januari 2017.

Paket amandemen disponsori oleh Partai AK terdiri dari 18 artikel dan berjudul "RUU Amandemen untuk Konstitusi Republik Turki." Majelis Agung menyetujui paket dengan 339 suara (dari kemungkinan total 550 suara), dan mengirimkannya ke presiden. Presiden menandatangani RUU yang sekarang sedang menunggu pemungutan suara populer 16 April 2017.

Dengan berlakunya sistem Presidensial di negara Turki yang menetapkan seorang presiden yaitu Erdogan sehingga memiliki kekuasaan serta wewenang yang jauh lebih besar. Jika pada sistem parlementer jabatan sorang presiden hanya bersifat simbolis karena yang menjalakan pemerintahan adalah perdana menteri tetapi setelah diterapkan sistem presidensial jabatan presiden tidak lagi bersifat simbolis karena akan jauh terlibat aktif menjalankan pemerintahan.

Erdogan yang menjadi poros utama dalam pemerintahan Turki memiliki kewenangan diantaranya; Pertama, menerapkan status darurat. Kekuasaan lain diberikan kepada 33 presiden dalam sistem presidensial yang termuat didalam paket pemerintah adalah kekuatan untuk menyatakan keadaan darurat dan memperpanjang durasi keadaan darurat. Memberikan kekuatan untuk mendeklarasikan keadaan darurat selama maksimal enam bulan dan untuk memperpanjang durasi keadaan darurat untuk maksimum empat bulan adalah konsisten dalam dirinya sendiri. Dalam sistem parlementer, dalam konstitusi 1982, kekuasaan ini diberikan kepada Dewan Menteri, karenanya eksekutif cabang. Dalam sistem baru, wajar bagi presiden untuk menggunakan kekuatan ini karena dia sendiri adalah cabang eksekutif. Dalam hal apapun, legislatif cabang masih berwenang untuk menyatakan,

memperpanjang dan mempersingkat jangka waktu keadaan darurat dan mencabutnya.

Dengan kata lain, eksekutif akan melakukannya dapat menggunakan kekuatan di bawah pengawasan (Yilmaz, 2018, hal. 8) Kedua, memilih dan menetapkan wakil presiden. Paket sistem pemerintahan presidensial menetapkan bahwa presiden yang terpilih dapa menunjuk satu atau lebih wakil presiden. Wakil presiden di Turki mendapat sorotan karena akan diputuskan oleh presiden sendiri tanpa tunduk pada kriteria apa pun. Ketika dipertimbangkan dari sudut pandang hubungan antara yang ditunjuk dan yang dipilih oleh presiden secara langsung ada kemungkinan bahwa siapapun yang ditunjuk sebagai wakil presiden dalam menggunakan wewenang yang diberikan dapat menimbulkan krisis legitimasi atas unsur peradilan dan legislatif. Pada situasi ini menteri dalam jajaran kabinet tidak dapat diangkat menjadi wakil presiden. (Yilmaz, 2018, hal. 53) Ketiga, melakukan intervensi dalam sistem hukum. kekuatan presiden menunjuk setengah anggota Mahkamah Konstitusi, Dewan Negara, dan Jaksa (HSYK) yang ditetapkan dalam 34 ranah kekuasaan kehakiman presiden dalam “Proposal Eksekutif” dalam proposal tersebut.

BAB III
KAPABILITAS SISTEM POLITIK

A. Definisi Kapabilitas Sistem Politik

Kapabilitas sistem politik sebagai salah satu hal dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah sistem politik dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya, yang berupa tantangan secara eksternal dan tantangan secara internal. Kapabilitas sistem politik juga merupakan sebuah kemampuan dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam sistem politik Negaranya, entah itu dalam pengelolaan sumber daya (sumber daya manusia maupun sumber daya alam).

Kemampuan dalam mengatur individu masyarakatnya, mengatur kelompoknya, mengatur organisasinya, perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Negaranya sehingga dapat patuh terhadap peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan, serta kemampuan dalam menciptakan masyarakat yang memiliki daya tanggap terhadap pemerintah, serta bisa menciptakan hubungan interaksi antar negara-negara lain.

Sistem kapabilitas mempunyai sebuah peran yang sanagt penting untuk meemanifestasikan sebuah kemampuan dalam prestasi atau dalam lingkup pemerintah, gambaran dari suatu keberhasilan pemerintahan harus kita pahami dengan sangat detail mengenai apa itu kapabilitas yang dimiliki oleh sistem politik pada saat diselenggrakannya sebuah pemerintahan. Kapabilitsa dari sistem politik menurut Gabriel A. Almond dan G.B. Powell Jr. dalam Silahudin (2011:13) terdapat enam macam, yaitu:

Yang pertama, kemampuan ekstraktif yaitu sebuah kemampuan dalam menyelenggarakan sistem politik untuk pengelolaan sumber daya alam baik itu sumber daya manusianya, baik di dalam negara ataupun di lingkup internasional.

Yang kedua, kemampuan distributif yaitu kemampuan sistem politik dalam mengelola pengalokasian atau pendistribusian berbagai

jenis barang yang ada di negaranya, serta pengaloksian dan pendistribusian dari individu atau kelompok yang ada di masyarakat. Misalnya kita tahu banyak produk produk local yang mulai dikenal di mancanegara. Hal tersebut merupakan bagian dari pengalokasian dan distribusi yang dijalankan dan merupakan kapabilitas, meskipun banyak juga yang tidak terdistribusikan dengan baik.

Yang ketiga, kemampuan regulatif yaitu bagaimana caranya suatu sistem politik dapat mengatur perilaku-perilaku individu atau mengontrol perilaku-prilaku suatu kelompok yang masuk dalam lingkup sistem politik. Kemampuan ini memiliki kekuatan yang sangat besar dalam sistem politik jika bisa mengendalikannya dengan baik, jika dijangkau dan di genggam dengan baik maka hal tersebut akan menjadi kekuatan yang dapat mengendalikan individu dan kelompok untuk patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan.

Yang keempat, kemampuan simbolik dalam kemampuan simbolik ini dituntut untuk bisa mengenali dan memahami kondisi dan lingkungan-lingkungan masyarakatnya. Yang dimana dalam kemampuan ini bisa menganalisis apa yang masyarakat inginkan melalui symbol-simbol yang masyarakat berikan. Bisa kita kasih contoh simbol dalam komunikasi bisa dikatakan bahasa, nah bisa kita katakan bahwasanya sistem politik harus bisa memahami dan membaca apa yang rakyat inginkan dan rakyat sampaikan.

Yang kelima, kemampuan responsif kemampuan responsif ini merupakan daya tanggap yang dimiliki sistem politik untuk merespon segala tanggapan dan tuntutan yang disampaikan, baik dari lingkup internal maupun dari lingkup eksternal. Bahkan jika itu pun tuntutan dan tanggapan dari masyarakatnya sendiri, dengan artian kemampuan responsif ini dituntut untuk cepat dan tanggap dalam merespon segala tuntutan yang disampaikan oleh masyarakatnya sendiri.

Karena kita tahu bahwa terkadang jika kita sebagai masyarakat, terutama kami para mahasiswa jika memberikan sebuah tanggapan ataupun sebuah tuntutan kami selalu tidak di dengarkan bahkan kami selalu dibiarkan dan pura-pura tidak di dengar, bahkan ada yang

sampai menggunakan sistem kekerasan untuk mengusir kami yang menuntut dan memberikan tanggapan kepada pemerintahan. Contoh kasusnya dalam demo biasanya banyak dari kami yang mendapat balasan kasar serta terkadang menggunakan cara kekerasan untuk mengusir kami sampai-sampi ada juga yang kehilangan nyawa.

Yang keenam, kapabilitas domestic dan internasinal yaitu kemampuan Dallam berinteraksi dengan lingkungan internasional. Lingkungan internasional ini mencakup interaksi antara lingkungan domestik, yang dimana lingkungan domestik ini memiliki kapabilitas yang dapat mempengaruhi lingkungan internasional. Hal tersebut bisa kita contohkan dengan bentuk perdagangan yang ada di negara kita, seperti kita semua ketahui bahwa negara kita ini merupakan negara dengan sumberdaya yang banyak dan melimpah serta terkenal juga dengan negara atas kekayaan rempah-rempahnya.

Maka dari itu hal tersebut merupakan kapabilitas yang kita miliki dengan cara mengekspor sumber daya yang kita miliki ke negara-negara lain. Bisa kita perhatikan bahwa kapabilitas sistem politik dari perspektif Almond, kita mengetahui fakta bahwa sektor pertambangan kita itu didominasi oleh orang asing yaitu sekitar 3/4 persen, serta kurang dari 9/10 sektor pertanahan juga dipegang oleh asing. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan sistem politik kita itu lemah.

Efek dari hal tersebut yang menyebabkan kemiskinan terus meningkat karena sumber daya yang kita miliki bukan dikelola oleh kita sendiri, pemilik asli sumber daya tersebut jatuh pada orang asing sedangkan kita selalu pribumi hanya sebatas suruhan dan sebatsa buruh kecil yang menjadikan hal tersebut sebagai mata pencaharian. Secara ekonomi data mengenai utang di luar yang dimiliki Indonesia mencapai Rp. 2.845.25 Triliun hal tersebut memperlihatkan lemahnya sistem politik di Indonesia dalam masalah keuangan.

Kapabilitas dalam mengendalikan dan mengatur individu kemasyarakatannya juga terlihat mulai melemah, meningkatnya konflik-konflik sosial di kalangan masyarakat yang kurang lebih sudah

berjalan sekitar 10 tahun. Jumlah angka konflik setiap tahunnya meningkat sekitar lima sampai sepuluh kasus dengan rata-rata dalam setiap tahunnya berjumlah sekitar 70 sampai 80an.

Pengukuran prestasi sistem politik dari sisi moral saat ini sudah sering ditinggalkan karena dianggap sangat tidak akurat dan subjektif, sehingga bisa kita ukur melalui sudut pendekatan dalam kapabilitasnya ketika terjadi tantangan dan persoalan yang dihadapi. Kapabilitas diartikan sebagai "kemampuan" sistem politik dalam menjawab setiap persoalan yang timbul dari lingkungan internal maupun lingkungan internasional.

Di dalam sebuah teori sistem, kapabilitas merupakan salah satu fungsi dari suatu sistem yang dihubungkan dengan lingkungan sekitarnya. Pendekatan kapabilitas menekankan pada metode empiris dengan mengamati hal-hal yang dapat diukur dan diobservasi. Sehingga dalam pendekatan kapabilitas sering dibicarakan prestasi apa yang secara riil telah dikerjakan suatu sistem politik (bukan yang akan dikerjakan).

Mengenai sebuah perihal yang berkaitan dengan kapabilitas dari sebuah sistem politik yaitu terdapat dari faktor-faktor yang bisa menjadi sebuah pengaruh. Kapabilitas sistem politik itu sendiri sangat penting sekali terutama bagi para kaum elit politik ketika mendiskusikan sesuatu yang kemudian akan dirumuskan dan selanjutnya ditentukan menjadi sebuah tidak lanjut. Dalam hal tersebut menyebabkkan sistem poltik harus bisa mengimbangi apa yang menjadi sebuah tuntutan yang muncur dari dalam lingkuna politi itu sendiri maupun yang datang dari luar lingkungan itu sendiri, tetapi dengan tidak mengubah struktur yang sudah ditetapkan. Arifin dalam silahudin menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi pengaruh pada kapabilitas sistem politik. Beberapa definisi kapabilitas menurut para ahli:

Baker and Sinkula (2005), menurut mereka kapabilitas adalah sebuah skill atau sebuah keterampilan yang cukup spesifik yang dimiliki seseorang individu ataupun sebuah kelompok yang menjadi

sebuah relasi yang bisa dimanfaatkan menjadi sebuah keunggulan yang kompetitif.

KBBI (2014), menurut KBBI sebuah kapabilitas adalah bentuk dari terwujudnya melalui penggambaran sebuah kemampuan yang tidak hanya memiliki arti dari kemampuan itu sendiri melainkan dalam bentuk nyata yang bener-benar memiliki dan menggenggam kemampuannya dari sudut kelemahannya dan tau cara untuk menyelesaikan serta cara untuk mengatasi hal tersebut.

Nusbaum, memberikan penjelasan mengenai bagaimana mengukur kapabilitas itu sendiri, dan dalam hal mengukurnya memerlukan beberapa kriteria di antaranya; Kemampuan dalam kesehatan, integritas, emosi, alasan praktis, afiliasi, bermain, dan lingkungan seseorang.

1. Kapabilitas Pemerintah

Maintaining Competition Yang menjadi syarat yang dimiliki pemerintah sebagai khalifah atau orang yang memegang sebuah kekuasaan dalam kehidupan bernegara adalah maintaining competition atau mempertahankan kompetisi. Maksudnya mempertahankan kompetisi atau persaingan di sini adalah pemerintah harus bisa menjaga dan mengendalikan kompetisi yang ada di dalam diri masyarakatnya baik dalam ranah ekonomi, ranah sosial, dan juga budaya. Pemerintah tidak boleh membiarkan terjadinya kompetisi yang tidak sehat karena lambat laun ini akan menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan.

Contoh: Dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah tidak boleh menganak tirikan sebuah pihak yang nantinya akan menimbulkan kecemburuan sosial. Misalnya tidak menganggap atau menganggap lemah kaum minoritas.

Maintaining Natural Resources Kapabilitas pemerintah yang kedua yaitu maintaining natural resources atau mempertahankan SDA. Sumber daya yang berasal dari alam merupakan kebutuhan hidup banyak orang di suatu negara, baik itu sumber daya yang tidak bisa

diperbaharui ataupun sumberdaya yang bisa upgrade. Pemerintah di sini harus dapat mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam supaya tidak berlebihan atau melewati batas, dan membuang-buang sumber daya alam. Sehingga nantinya generasi selanjutnya dapat menikmati manfaat dari sumber daya tersebut.

Contoh: Di suatu daerah yang memiliki sumber daya yang melimpah seperti di Papua, Sumatera, dan Kalimantan pemerintah harus dapat mengontrol eksploitasi yang dilakukan oleh para pengusaha sehingga kelak sumber daya kita tidak habis dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

B. Bentuk-Bentuk Kapabilitas Sistem Politik Dan Kasusnya

Kapabilitas merupakan sebuah bentuk sistem politik dalam melawan sebuah tantangan yang menyerangnya. Adapun 6 (enam) Macam Kapabilitas dalam Sistem Politik yaitu: ekstraktif, distributive, regulative, simbolik, responsive, dan Kapabilitas internasional.

1. Ekstraktif

Berhubungan dengan sumber kekayaan alam dan sumber daya manusia. Seperti apa pengelolaan kekayaan alam yang diolah untuk kepentingan negara, kepentingan daerah, dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya bagaimana sumber daya manusia didayagunakan untuk pengolahan sumber daya yang berasal dari alam, kehidupan dalam suatu sistem bergantung terhadap sumber dana yang bisa diperoleh oleh kapabilitas ekstraktif karena sangat berkaitan dengan kapabilitas distributif.

Contoh kasus : Tambang emas yang berada di daerah Papua yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia yang dimana PT tersebut dapat menyetorkan pajaknya saja sebesar 19 triliun.

Meskipun dalam kapabilitas ekstraktif tersebut sudah terealisasi tetapi kenyataannya sumber material tersebut belum bisa mengolah sumber kekayaan alam dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyat, rakyat masih saja terjerat dalam arus kemiskinan yang semakin bertambah menjadi kemelaratan. Sejak kontribusi pajaknya

19 triliun itu dianggap sangat tidak sebanding dengan apa saja yang telah dilakukan oleh PT FI tersebut, kemudian memberikan dampak yang buruk juga terhadap lingkungan berupa limbah yang dibuang secara sembarangan.

Pihak asing pun berpendapat bahwa kelemahan sistem politik di negara tercinta ini adalah karena sistem politik yang tidak mampu melindungi tanah airnya sendiri, selanjutnya memberikan efek terhadap angka kemiskinan yang semakin bertambah sudah sekitar Sembilan tahun angka kemiskinan tersebut tidak berubah dan bergerak turun.

2. Distributif

Setelah sumber daya alam diolah, kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Hal tersebut di perlihatkan kepada masyarakat, yang paling penting dari kemampuan distributif ini adalah sebuah jumlah dan sepenting apakah barang untuk didistribusikan.

Contoh kasus: Sumber masalah dalam kasus ini adalah sumber pendapatan yang tidak memiliki perhatian dan tindakan dari pemerintah, semakin buruknya menyebabkan hal tersebut menjadi beban contoh dalam hal biaya untuk mendapatkan pendidikan yang kian tahun kian meningkat yang menyebabkan beberapa anak yang seharusnya mendapatkan hak pendidikan harus merampungkan harapannya karena terhambat biaya.

Mengapa dalam hal tersebut terlihat seperti diskriminasi terhadap anak-anak yang hanya bersekolah di daerah pedesaan yang selalu di samaan dengan anak-anak yang tumbuh di perkotaan dan memiliki pendidikan lebih baik dibanding anak-anak yang tumbuh di desa dan sulit mendapatkan pendidikan. Selain itu pelayanan yang menyangkut kesehatan juga mempersulit orang-orang yang hanya sekedar dari kalangan menengah kebawah, sementara kelompok orang-orang menengah atas bahkan konglomerat memiliki pelayanan yang sangat baik.

Ada banyak kasus tersebut seperti seorang bapak yang ditolak rumah sakit untuk operasi karena tidak memiliki E-KTP yang akhirnya

orang yang membutuhkan perawatan tersebut meningga, bukankah alasan seperti itu hanya sebuah alasan yang tidak bisa kita mengerti? Bukankah seharusnya pelayanan kesehatan itu melayani orang-orang yang membutuhkan tenaga medis? Tidak bisa dibayangkan seberapa sakitnya penderitaan yang dialami orang tersebut, seberapa terlukanya keluarga yang ditinggalkan? Tapi jika itu adalah seorang konglomerat bukankah pelayanan yang didapatkan berbeda bahkan bisa menerobos antrian dari kaum bawah? Bukankah hal tersebut malah memberikan pandangan semakin buruk terhadap sistem politik di negara kita ini?

3. Regulatif

Dalam hal ini menyangkut mengenai seperti apa penyelenggaraan sistem politik dalam mengawasi perilaku dari setiap kelompoknya maupun dari individunya, serta bagaimana dalam menempatkan pengawasan untuk mengawasi yang lainnya yang berkecimpung di dalamnya, termasuk dalam pengendalian atau pengaturan terhadap seorang pengusaha, buruh dan yang lainnya.

Contoh kasus : Regulatif sendiri merupakan sebuah kemampuan kritis di Indonesia. Seharusnya bisa berperan untuk mengontrol dan mengendalikan segala bentuk tingkah dan laku yang berjalan dalam sebuah sistem politik, tetapi hal tersebut malah di salah gunakan bahkan menjadikan peraturan yang dibuatnya sebagai sebuah benteng.

Banyak kasus-kasus cukup besar sedang terjadi di negara Indonesia, contohnya orang yang membuat perundang undangan tetapi malah mereka sendiri yang melanggarnya sungguh lucu bukan. Banyak juga kasus-kasus hukum yang dilakukan oleh si penegak hukum itu juga.

Jika regulatif dalam politik diartikan sebuah interaksi yang digunakan untuk mempengaruhi dalam penggunaan pemasaran dalam bentuk fisik bisa kita katakan bahwa hal tersebut membuat pandangan kita terhadap sistem politik menjadi sebuah sistem yang sangat tidak efektif, perusakan dan pembatasan-pembatasan penggunaan media dalam beribadah menjadi sebuah hal yang memanas akhir-akhir ini.

4. Simbolik

Tingkat kapabilitas simbolik ini ditentukan oleh efektivitas dalam berjalannya sebuah simbol sistem politik dalam sebuah lingkup secara internal maupun lingkup eksternal. Para elit dalam dunia politik harus bisa mengeluarkan sebuah kebijakan dengan berdasarkan pada sebuah pertimbangan terhadap masyarakat bisa menerimanya, bahkan harus siap juga dalam menghadapi sebuah penolakan dari masyarakat jika hal itu berurusan menjadi tidak terkenal lagi.

Contoh kasus : Dalam kemampuan simbolik sistem politik yang dimiliki oleh negara kita tidak menunjukkan seorang pemimpin yang memegang kepemimpinan, pengaruh ban kepercayaan. Salah satu contoh dari pemimpi-pemimpin kita terdahulu yaitu Ir. Soekarno yang memiliki aura sangat berpengaruh dan Gus Dur yang di kenal sebagai pemuka agama, apresiasi yang diberikan kepada para pemimpin tersebut adalah sebuah bentuk kehormatan yang diberikan kepadanya.

Akan tetapi jika kita telusuri di era sekarang ini sudah jarang seorang pemimpin yang memiliki sebuah simbol yang membuat dirinya menonjol, dari hal tersebut menyebabkan lahirnya pemimpin hanya sekedar tugasnya sebagai pemimpin bukan benar-benar berjiwa pemimpin dan memiliki simbol yang khas.

Para pemimpin yang memanfaatkan sebuah kebaikan sebagai sebuah citra bagi dirinya untuk bertahan lebih lama dari saingannya. Banyak para calon yang akan menjadi pemimpin berlomba-lomba untuk menarik perhatian dari masyarakat. Barangsiapa yang gerakannya memiliki sebuah dukungan dari rakyat maka disitulah dia akan menang sebagai posisi pemimpin, dengan hal-hal yang dibuat-buat sebagus mungkin.

5. Responsif

Dalam kelebihan responsive system di dalam perpolitikan di pastikan oleh sebuah ikatan yang berasal dari dalam dan luar. Sebuah sistem dalam politik seharusnya bias cepat tanggap dalam situasi tertekan sekalipun, baik itu berupa sebuah keluhan-keluhan ataupun

sebuah tuntutan-tuntutan yang dilontarkan oleh masyarakat. Dalam sebuah birokrasi yang dipimpin pemerintaha biasanya akan di kendalikan oleh eorang kepala negara yang di bantu oleh para jajarannya, dalam hal itu akan sangat sedikit resiko tertekan terhadap tuntutan yang berasal dari dalam politik itu sendiri.

Contoh kasus : Dalam kasus resposif sendiri bahwasanya sistem politik kurang dalam mewadahi yang menjadi kepentingan bagi masyarakat dalam lingkup politik. Kebijaksanaan dalam sistem politik yang telah dibuat para kaum politik elit yang dimana kebijakan tersebut hanya menyesuaikan bagi mereka dan bukan untuk masyarakat. Hal-hal yang dikeluhkan masyarakat selalu tidak didengar bahan seperti sengaja menutup telinga, meskipun menggunakan cara yang lebih berani yaitu dengan cara memberikan tuntutan di depan gedung pemerintahan.

Hal tersebut meskipun menjadi sebuah tragedi yang menyebabkan kekacauan bahkan sampai merenggut nyawa pun tetap tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah mereka benar-benar dibutakan oleh sebuah kekuasaan. Maka dari itu terbentuklah sebuah lembaga yang mewadahi apapun yang menjadi keluhan dan tuntutan rakyat sehingga hal tersebut dapat seimbang dengan apa yang diinginkan masyarakat dengan kebijaksanaan yang diterapkan.

Tujuan dari program legislatif Nasional (Prolegnas) seperti pada kasus Prognas di tahun 2013 yang mempunyai tujuan 76 RUU sampai berakhirnya sidang sesi pertama di tahun 2013-2014. 15 RUU yang disahkan , pada periode 2009-2014 ada RUU yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri karena adanya ketidak sepakatan dari masyarakat.

Maka hal tersebut semakin mejelaskan sudut pandang masayarakat bahwasanya proses dan kebijaksaan dalam responsifnya lemah. Sebuah fenomena yang sering kita lihat, dengar dan tonton sepertinya sekarang ini sedang famous di negara kita, bahwasanya praktek korupsi sedang marak terjadi dalam pemerintahan di negara kita tentunya dengan jumlah yang sangat fantastis. Bahkan hal tersebut

seperti sudah menjadi hal yang biasa di dalam sistem perpolitikan kita, setengah dari 100 persen pemimpin yang melakukan pemilu dengan sangat mahal dan mewah mereka biasanya tersangkut dengan kasus korupsi.

Banyak para anggota legislatif juga yang terperosok kedalam korupsi. Hal tersebut bisa kita buktikan pada saat pemilu dilaksanakan, jika diamati setiap calon akan menggelontorkan uang yang sangat besar agar bisa terpilih dan mengalahkan saingannya, dan tentunya itu bukan hanya sekedar uang puluhan juta saja tapi bisa mencapai sampai triliunan.

Dalam kasus tersebut bisa kita amati betapa mahalnya sistem perpolitikan di negara ini, dan karena mahalnya biaya dalam berpartisipasinya maka tidak sedikit para calon yang terpilih melampiaskannya melalui korupsi. Bisa kita sadari betapa lemahnya sistem politik yang ada di negara ini, dan bisa kita bayangkan orang-orang yang korupsi tersebut telah merugikan rakyat dan negara demi memuaskan kepentingan pribadi.

6. Internasional

Artinya kemampuan sistem politik dalam jaringan internasional yang terlihat dari luar. Kapabilitas internasional ini bisa di tentukan oleh kemampuan regulatifnya yang bersifat internasional. Mengenai bagaimana sistem politik itu sendiri menjadi pengaruh sekaligus bisa mengendalikan sistem dalam politik lainnya.

Pengaruh dan kendali yang berasal dari luar kepada sistem politik lainnya dapat dilihat dari kebijakan yang dibuat untuk luar negri, semisal hubungan antar pedagang secara internasional yang mampu berinteraksi dengan lingkungan lokal maupun mancanegara. Sebuah kemampuan variabel yang dimiliki dalam sistem politik itu sendiri memiliki pengaruh yang cukup lumayan terhadap lingkungan internasional. kelebihan dalam lingkungan internasional itu sendiri merupakan sebuah kemampuan dari dalam sistem politik yang bisa dilihat dari luar.

Contohnya kebijakan antara sistem politik Amerika Serikat kepada Israel, yang dapat mempengaruhi sikap-sikap politik lainnya pada negara-negara yang berada di timur tengah. Hal tersebut juga mempengaruhi terhadap negara lainnya dalam masalah politik, yang bergantung kepada berjalannya dua variabel.

BAB IV

KAPABILITAS SISTEM POLITIK ORDE LAMA DAN ORDE BARU

A. Orde Lama

Pada masa orde lama dimulailah dengan yang namanya demokrasi terpimpin yang di naungi oleh presiden Soekarno pada tahun 1959. Dengan dibubarkannya parleman yang sudah terbentuk dengan pergantian ke parlemen baru yang beranggotakan sebagian masih dari paelemen yang lama dan sisanya ditunjuk secara langsung oelh SOekarno itu sendiri. kedudukan para militer yang kuat di sadari oleh presiden Soekarno dan beliau tau bahwa hal tersebut akan membahayakan baginya. Dengan demikian beliau mengandalkan dengan dukungan yang diberikan kepadanya yaitu dukungan dari PKI agar bisa mengimbangi kekuatan yang dimiliki oleh militer.

Nasakom merupakan sebuah filososfi yang diberikan anatara PKI dan militer yang diamana Nasakom sendiri merupakan sebuah kata yang bersala dari akronim yang makananya merupakan sebuah pencampuaran anatara tiga buah idoelogi yang ada pada saat itu yang disebut dengan NAsionalisme, Agama, dan juga Komunis. Dari ketiga ideology tersbut mempunyai sebuah titik kesamaan yang bertitik berat pada kepemerintahan dan kepemimpinan yang dipimpin ole presiden Soekarno itu sendiri agar ketiga bentuk ideology tersebut bisa tetap dalam kesatuan dan tujuan yang sama.

Karakter yang dimiliki oleh demokrasi terpimpin yang memeiliki sebuah kecenderungan anti terhadap barat di setiap kebijakan yang dibuatnya. Presiden Soekarno juga memperkuat upaya-upaya agar bisa mengambil bagian barat daripapua yang pada saat itu berada dalam genggaman Belanda. Pada saat itu terjadillah sebuah konflik senjata yang terbilang cukup lama, kemudian Belanda menyerahkan Papua kepada PBB dan PBB pada saat itu menyerahkan kembali ke Indonesia.

Politik konfrontasi yang diadakan oleh presiden Soekarno untuk melawan Malaysia di tahun 1962 sampai dengan tahun 1966.

Beranggapan jika berdirinya Federasi Malaysia,Malaka,Singapur, dan Kalimantan yang pada saat itu dikuasai oleh bangsa Inggris yang dimana hal itu merupakan sebuah gerakan lanjutan dalam rangka menghancurkan Malaysia.bagian yang termasuk kedlam konfrontasi tersebut adalah pada saat keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB dengan alasan bahwa PBB memberikan izin pada Malaysia untuk masuk menjadi anggota.

Di tahun 1965, presiden Soekarno membuat sebuah keputusan untuk memutuskan hubungan dengan dunia kapitalis dari Barat, keluarnya Indonesia dari daftar keanggotaan International Monetary Fund (IMF) dan juga dari Bank Dunia. Maka hal tesebut tentunya menjadi salah satu faktor pemutus bantuan dari negara-negara lain untuk membantu Indonesia, yang pada saat itu sebenarnya bantuan itu sangat di butuhkan. Tentusaja itu menjadi salah satu faktor dalam merosotnya perekonomian di Indonesia yang pada masa itu juga telah mencapai level paling mengerikan dalam masalah keuangan di Indonesia.

Orde lama dituliskan dalam sejarah perpolitikan di Negara Indonesia, pada era orde lama ini pemerintahannya di pegang oleh bapak Soekarno atau bisa disebut juga dengan nama lain yaitu masa demokrasi terpimpin. Sebutan orde lama pada masa pemerintahan Soekarno tentu saja bukan sebutan pada masa itu, tetapi sebutan orde lama ini diciptakan pada masa pemerintahan Soeharto yang dimana masa pemerintahan beliau disebut dengan orde baru.

1. **Politik Masa Orde Lama**

   Pemerintahan pada masa orde lama dengan sistem pemerinatahan Negara Indonesia pada saat itu mengalami beberapa halangan dalam proses peralihannya, bahkan Indonesia telah menerapkan sebuah sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan presidential, parlemener, demokrasi dan masih banyak lagi bahasa lainnya, serta sebuah sistem pemerintahan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin.

Adapun yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin itu sendiri adalah sebuah sistem yang dalam segala pengambilan keputusannya itu berasal dari seseorang yang menjadi pimpinan negara dan bisa dikatakan sebagai sebuah keputusan tertinggi dari segala keputusan. Sistem demokrasi terpimpin ini pertamakali diresmikan pada saat pembukaan sidang konstituante tahun 1956 pada tanggal 10 November. Tapi bisa dikatatakan di sayangkan karena terjadinya beberapa penyimpangan diantaranya :

a. Pacasila yang identik dengan NASAKOM.
b. Hukumnya yang memiliki tingkatan yang sama dengan undang-undang yang ditetapkan dalam PenPea tanpa adanya diskusi untuk persetujuan.
c. MPRS menyatakan bahwa mengangkat presiden Soekarno sebagai presiden untuk seumur hidup.
d. DPR hasil dari pemilu pada tahun 1955 dibubarakan oleh presiden.
e. Pernyataan perang Malaya.
f. Pernyataan keluar dari PBB.
g. Hak budget yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pada masa pemerintahan orde lama ini periode demokrasi liberal menjadi sebuah penghambat dalam proses perkembangan di Indonesia, hal tersebut di sebabkan karena terdapat perbedaan dalam masalah ideologis di dalam kabinet-kabinetnya. Presiden Soekarnopun memberikan sebuah solusi yaitu dengan adanya demokrasi terpimpin yang artinya pengembalian di serahkan pada UUD 1945.

Dengan menggunakan sistem kepemimpinn yang kuat dengan tendensi otoriter, dengan demikian hal tersebut memberikan sebuah keuntungan yang menjadikan beliau memiliki banyak kekuasaan dalam menjalankan rencana-rencana yang telah di perhitungkan. Para militer yang tidak memiliki suara yang sama karena diberikan peran yang kecil dalam perpolitikan, yang pada saat itu ikut mendukung untuk perubahan orientasi. Di tahun 1958 presiden Soekarno memberikan sebuah pernyataan bahwasanya militer itu merupakan

sebuah kelompok fungsional, bisa di artikan para militer tersebut memiliki sebuah peran di atas panggung yang di buat dalam panggung perpolitik pada masa demokrasi terpimpin yang dimana nantinya perannya juga akan menjadi lebih besar.

Adapun yang namanya demokrasi parlementer yang di tandai dengan adanya sebuah ketidakstabilan yang terjadi di Indonesia. Pada kisaran tahun 1950an pemicu utamanya yaitu terjadinya sebuah perbedaan arah sudut pandang menganai apa yang menjadi dasar dalam ideologi negara Indonesia. Hal tersebut bisa kita lihat tentunya dalam sejarah perpolitikan di Indonesia yang dimana pada saat pemilu dilaksanakan untuk pertamakalinya di tahun 1955, bisa dikatakan bahwa pemilu tersebut dianggap sebagai penilu yang jujur dan adil. Dari ketiga partai tidak ada satupun yang dapat menguasai dan mengendalikian pemerintahan sehingga di masa tersebeut kabinet parlemennya terbentuk dari adanya sebuah koalisi-koalisi yang bersumber dari berbagai ideologi yang ada. Pada masa tersebut terjadi pergantian tujuh kabinet dengan cepat dan dari setiap kabinetnya gagal dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam perencanaan untuk membuat perubahanperubahan terhadap Negara.

Selain hal tadi di atas ada juga beberapa perselisihan yang terjad di dalam elit politik pada pemerintahan pusat yang menyebabkan terancamnya persatun Indonesia. Adanya gerakan Darul Islam yang mempunyai tujuan untuk mendirikannya sebuah negara islam dengan kedaulatan islam sebai sistem dalam negaranya, gerakan tersebut yang sudah direncanakan dan sudah dilakukan dari msasa colonial belanda, namun dengan cepat mereka merubah arah haluannya untuk melawan kekuasaan pemerintahan yang berada di bawah pimpinan presiden Soekarno yang kemudian gerakan mereka mengaku menyerah pada 1962.

Adapun beberapa gerakan-gerakan lainnya yang mengakibatkan sebuah dampak terhadap Piagam Perjuangan Semsesta (Pemesta) yang berada di Sulawesi Utara dan PPRI di Sumatra Barat. Pada saat itu keduanya telah memulai dan mengkonfrontasi

pemerintahan pusat dengan memberikan berbagai tuntutan dengan alasan reformasi politik, ekonomi, dan yang lainnya. Gebrakan tersebut yang dimpimpin oleh perwira dari militer dan medapatkan dukungan dari para anggota yang tergabung dalam organisasi Masyumi dan CIA yang merupakan berasal dari Amerika Serikat. Mereka beranggapan bahwasanya dengan adanya komunitas yang bernama PKI tersebut merupakan sebuah ancaman besar bagi mereka.

Pemerintahan pusat sukses menghapus gebrakan-gebrakan tersebut berkat bantuan dari kekuatan militer. Mantan anggota-anggotanya yang terbentuk dari pemerintahan colonial belanda mempunyai sebutan dengan nama KNL (Koninklijk Nederlansd Indische Leger) mengudarakan proklamasi Republik Maluku Selatan Pada tahun 1950, meskipun mereka pernah dikalahkan oleh para pasukan militer yang dikirim oleh Indonesia tetapi konflik masih saja terus berlanjut hingga tahun 1963.

Tahun 1965 pata tanggal 30 September menjadi sebuah sejarah yeng terukir dengan jelas bahwasanya sangat berbahaya efek samping dari politik campuran yang telah di ciptakan oleh presiden Soekarno. Kita tentu sudah tahu tragedi apa yang terjadi di hari tersebut bukan? Dan hari itu merupakan hari yang menjadi titik kelam bagi sejarah perpolitikan juga.

Kejadian penculikan terhadap keenam jendral dan seorang letnan yang dibunuh oleh para perwira-perwira yang berada di jalur kiri, mereka menamkan dirinya sendiri dengen “Gerakan 30 September”. Dari keterangan yang ada ketujuh perwira tersebut dituduh bahwa mereka telah menjalankan sebuah rencana untuk melakukan sebuah kudeta terhadap presiden Soekarno, tetapi yang sebenarnya tidak ada bukti pasti bahwa mereka akan melaksanakan rencana kudeta tersebut.

Tapi tidak ada bukti yang memang menunjukkan bahwa PKI juga yang berada di balik semua serangan tersebut untuk menggagalkan rencana kudeta. Soeharto yang pada saat itu sebagai seorang kepala komandan cadangan strategis angkatan darat, beliau

yang kemudian mengambil alih kekuasaan militer karean beliau yang memegang jabatan perwira tertinggi setelah terjadinya tragedi pembunuhan terhadap atasannya dan dengan keputusan cepat ia menyalahkan atau menggunakan PKI sebagi objek untuk ditunjuk sebagai yang bersalah. Maka setelah ditunjuknya PKI sebagai yang bersalah para pengikut komunis dan semua yang diduga mengikuti komunis di musnahkan dengan kata lain semua orang yang masuk kedalam komunis di bantai sampai habis. Dari beberapa dugaan yang melakukan pembantaian tersebut merupakan untit militer , kriminal sipil dan Ansor.

Banyak isu yang bertebaran mengenai kejadian tersebut terutama mengenai kudeta dan yang mungkin sampai sekarang benar-benar masih ada yaitu gerakan-gerakan anti komunis tetapi yang sudah pasti belum tentu kebenaran tersebut mutlak atau bisa saja apa yang terjadi merupakan sebuah pengalihan dan PKI dijadikan sebagai korbannya tidak ada yang tahu kebenarannya.

Nah setelah berakhirnya masa pemerintahan presiden Soeharto justru timbulah keraguan-keraguan bahwa penjelasan yang dikeluarakan dan menyatakan bahwa komunis itu salah merupakan sebuah kejadian yang dimana tidak banyak mendapatkan sebuah perhatian besar dan tidak banyak mendapatkan diskusi dari publik. Isu mengenai PKI ini seperti sengaja untuk di hilangkan dan sengaja di hapus jejaknya agar tidak lagi muncul kepublik dan publikpun dibuat bungkam mengenai masalah tersebut.

Tetapi setelah ada laporan dari Komnas HAM di tahun 2012 yang dimana mereka menyatakan bahwa kejadian pembantaian yang dilakukan tersebut merupakan sebuah pelanggaran dalam hak asasi manusia dan tentunya merupakan pelanggaran yang sangat kejam dan sangat tidak memanusiakan manusia sebagaimana mestinya, tetapi tentunya kasus tersebut sudah terlambat untuk di sesali bukan? Sebaiknya kita mengambil perhatian dan mengambil contoh bahwa kita tidak boleh dahulu percaya terhadap asumsi yang memamng belum berdasar pada fakta, yang belum sesuai kaena kita di anugrahi mata dan tekingan sebagi sarana utuk menyinkronkan apa yang kita

lihat dan dengar kemudian dengan di berikan otak untuk membuat kesimpulan.

B. Orde Baru

Yang dimaksud dengan orde baru adalah masa dimana pemerintahannya di pimpin oleh presiden kedua Indonesia yakni bapak Soeharto. Era orde baru ini sebagai bentuk perubahan dari orde lama yang dimana era tersebut di bawah pimpinan presiden pertama kita yaitu bapak Soekarno. Era orde baru ini berlangsung sejak tahun 1968 sampai pada tahun 1998.

Era orde baru atau bias juga disebut ORBA lahir setelah keluar surat perintah sebelah maret (Supersemar) yang diamana surat perintah tersebut menjadi sebuah dasar legalitas. Tujuan dari adanya orde baru itu sendiri yaitu untuk mengembalikannya ketertiban yang berada pada ruang lingkup kehiupan masyarkat, sebangasa dan senegara dengang berdasar pada sebuah kemurnian dalam pelaksanaan Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945.

Supersmar lahir dari siding cabinet dwikora yang diketuia olhe presiden pertama kita yakni presiden Soekarno. Di pertengahan rapat tersebut seorang bodyguard memberikan laporan bahwa di sekitar istana presidrn saat itu ada sekelompok pasukan yang tidak dikenali, presiden Soekarno menyerahkan rapatnya kepada wakil perdana mentri II untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. WPerda II yaitu Dr. Johannes Lemimena berangkat keistana yang berletak di bogor di temani oleh waperda I Dr. Subandrio, dan waperda III Chaerul Saleh, waperda II-pun setelah siding berakhir menyusul presideSoeharto.

Di satu sisi terdapat tiga petinggi yang memerintahkan permintaan menghadap kepada presiden, setelah mendapat ijin dari presiden ketiga petinggi tersebut dengan segera menghadap dan datang keistana bogor, mereka memiliki sebuah tujuaaan untuk memberkan laporan mengenai kondidi Ibu kota Jakarta dan memberikan keyakinan kepada presiden bahwasanya ABRI terkhususukan dar angkatan darat mereka dengan siagap dan dengan sangat siaga siap mengatsi situasi yang terjadi pada saat itu.

Presiden Soekarno sendiri kemudian memnberikan sebuah tanggapan dan memberikan sebuah perinah yang dimana perintah tersebut ditujukan

langsung kepada letnan Soeharto sebagai mentri dan panglima dari angakatan darat untuk mengambil sebuah tindakan demi keamanan, dan stabilitas pemerintahan demi tetap utuhnya antara bangsa dan negara perumusan dalam surat perintah ini dibantu oleh tiga petinggi ABRI, yaitu Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Machmud, dan Brigjen Sabur, Panglima Pengawal Presiden Cakrabirawa. Surat perintah yang sekarang kita kenal dengan sebutan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.

Tindak lanjut etelah keluaranya surat Supersmar, Soeharto dengan segera mengamabil tindakan. Di tahun1966 pada tanggal 12 Maret beliau mengeluarkan sebuah surat perintah yang isinya aadalah pembubaran dan keputusan disertai larangan untu para anggota partai komunis serta apapun organisasi yang ada di masyarakat yang berada di bawah partai komunis yang berada di Indonesia. Hasil dari keputusan Soeharto sendiri diperkuat oleh keputusan yang di berikan presiden, keputusan pembubaran partai komunis ini mendapatkan dukungan yang sangat banyak dan mendapatkan antusiasme serta hal tersebut juga merupakan salah satu tujuan dari Tritura.

18 Maret 1966, Letnan Soeharto berhasil mengamankan mentri yang berjumlah 15 orang yang di anggap bahwa ke-15 orang tersebut ikut andil dalam Gerakan 30 September. Setelah itu Soeharto kemudian memperbaiki cabinet dwikora dan juga lembaga-lembaga yang lainnya yang di anggap terlinat dalam gerakan 30 September. Kareana berlandaskan pada keputusan presiden No. 5 Tanggal 18 Maret 1966.para anggota yang merupakan partai komunis dianggap gugur dalam MPRS, kemudian MPRS di kembalikan lagi sesuai dengan UUD 1945, yaitu atas presiden bukan sebaliknya. Sekitar 62 orang yang sengaja diberhentikan dan beberapa mngundurkan diri dari kepemimpinan DPRGP sehingga pemimpinnya ti copot dari kedudukan sebgai mentri.

Diadakannya siding umum IV MPRS pada tanggal 20 Juni 1955, hasil dari siding tersebut adalah:

1. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pengesahan dan Pengukuhan
   Supersemar.

2. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara
3. Tingkat Pusat dan Daerah.
4. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI
5. Bebas Aktif.
6. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Pembentukan Kabinet Ampera.
7. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Tap. MPRS yang
8. Bertentangan dengan UUD 1945.
9. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Tata
10. Urutan Perundang-undangan di Indonesia
11. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Pernyataan Partai Komunis Indonesia dan Ormas-Ormasnya sebagai Organisasi Terlarang di Indonesia.

Hal tersebut dijadikan sebuah landasan awalmula berdirinya orde baru yang dimana hal tersebut mampu memenuhi dua tuntutan yang diberikan rakyat (tritura), yang diamana tuntutan itu berisis tentang tunntutan untuk dibubarkannya partai komunis dan membersihkan seluru cabinet dari para orang-orang komunis di dalamnya. Selain dua hal itu juga bahwasanya para kader dari partai komunis itu sendiri di bantai terutama mereka yang sedang berada di pedesaan.

Proses pembantaian yang dilakukannya tidak hanya dilaksanakan oleh para angkatan bersenjata saja, tetapi juga banyak rakyat biasa yang diberikan senjata untuk membantu proses pembantaian tersebut. Proses penangkapan yang tiak mengenal profesi, jabatan, umur dan sebagaianya mereka yang termasuk kedalam komunis di tangkap dan dikumpulkan berdasarkan sejauh mana mereka terlibat dalam partai komunis, meraka diasingkan ke daerah daerah terpencil seperti maluku. Kemudian setelah itu pemerintah selalu menayangkan film Gerakan 30 September setiap tahunnya.

Soeharto sendiri dalam memenuhi tritura aia mendukung apa yang menjadi ketetepam MPRS Np.XIII/MPRS/1966 yang dimana pada saat itu membentuk sebuah cabinet baru dengan nama cabinet Ampera. Ampera sendiri memiliki sebuah tugas utaman yaitu dengan menciptakan stabilnya ekonomi dan politik ataumungkin lebih familiar kita dengar dengan sebutan dwidarma cabinet ampera. Adapun proker dari kabinet ampera disebut dengan caturkarya, diantaranya :

1. Perbaikan pada kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang berperan dalam
   bidang sandang dan pangan;
2. Pelaksanaan pemilihan umum di dalam ukuran waktu yang di tuliskan dalam ketetepan
3. MPRS No. XI/MPRS/1966.
4. Pelaksanaan politik luar negri yang bebas aktif demi kepentingan nasional berdasarkan
   pada ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1996.
5. Kelanjutan dalam memperjuangkan anti imperialime dan koonialisme dalam berbagai aspek.

Kabinet baru ini dipimpin langsung oelh presiden pertama yaitu presiden Soekarno yang diamana pelaksanaannnya di serahkan untuk dilakukan oleh presidium cabinet yang dipimpin sendiri oleh jendral soehrto yang menyebabkan munculnya dualism dalam kepemimpinan sehingga ruang politik pada saat itu menjadi sangat kacau dan tidak stabil.

Presiden Soekarno yang di saat itu tentunya masih memiliki pengaruh dalam politik hanya saja pengaruh dan kekuasaan yang beliau miliki kian melemah. Banyak orang-orang yang mempunyai pendidikan di barat memberikan keluhan dan keberatan terhadap kebijakan-kebijakan yang Soekarno buat, karean pada saat itu Soeakrno dekat dengan partai komunis sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat yang dimana mereka tau bahwa bantuan dari Uni Soviet dan China mengalir ke Indonesia. Mereka beranggapan bahwa jika hal tersebut terus terjadi maka akan sangat dikhawatirkan Indonesia juga akan menjadi negara yang komunis.

Di tahun 1967 pada 22 Februari demi mengatasi konflik yang makin hari makin memamansa dan telah sampai pada puncaknya, presiden Soekarno kemudian menyerahkan kekuasaan atau menyerahkan kepemimpinannya kepada jendral Soeharto. Yang dituliskan dalam pengumuman presiden Mandataris MPRS panglima tertinggi ABRI. Pengumuman yang berdasarkan pada ketetapan MPRS yang dimana tertulis pernyataan apabila presiden memiliki halangan, maka pemegang surat perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden.

Di tahun 1967 pada tanggal 4 Maret, jendral Soeharto memberikan sebuah keterangan pemrintah di depan sidang DPRHR tentang penyerahan kekuasaan yang terjadi. Pemerintahtetap meminta mengadakan sidang MPRS supaya proses penyerahan kekuasaaan tersebut berjalan konstitusional, kemudian diadakanlah siding istimewa MPRS di tanggal 7-12 Maret 1967 yang dia adakan di Jakarta. Pengangkatan resmi Soeharto senagai presiden Republik Indonesia sampai pada pemiliha presiden yang dilaksanakan MPR di hasil pemilihan umum.

Adapun pada pemerintahan orde baru ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

1. GDP yang mengalami perkembangan yang lumayan sangat baik.
2. Transmigrasi yang berjalan dengan sebaik mungkin atau bisa dikatana berhasil.
3. Program KB yang berjalan dengan sukses.
4. Yang terakhir yaitu kits berhasil menghandle yang namanya buta huruf di kalangan masyarakat.

Pada awal pemerintahan orba ini yang mereka fokuskan yaitu terhadap sektor pertanian yang diamana menganggap bahwa pangan merupakan salah satu syarat untu kestabilan dalam politik dan ekonomi. Sektor pertanian yang berkembang dengan sangat pesat setelah beberapa pembangunan yang diberikan oleh pemrintah seperti diberikannya berbagai prasarana irigasi, teknologi terbaru, hingga memberikan seminar mengenai bisnis, dan juga memberikan tempat untuk pemasaran hasil pertaniannya melalui sebuah lembaga yang bernama Bulog (Badan Urusan Logistik). Dari tahun 1968 sampai 1992, hasil pertanian yang diperoduksi pada saat itu berkembang dengan sangat pesat.

Produksi padi yang pada saat itu mecapai 17 ribu ton tentunya jumlah tersebut merupakan jumlah yang menjadi peningkatan pesat karean meningkat tiga lai lipat dari sebelumnya hingga menghasilkan jumlah hasil panen sekitar 40 ribu ton lebih dan hampir mendekati 50 ribu ton di tahun 1992. Yang menandakan bahwasanya produksi beras pada masa itu sekitar 85,9 kg berubah menjadi 154 kg/jiwa. Tentu saja hal tersebut mejadikan sebuah peningkatan pesat dan mernjadikan sebgai sebuah prestasi yang di dapatkat oleh Indonesia, karean Indonesia pernah merasakan menjadi salah satu negagara dengan pengekspor beras terbesar sekitar than 1970-an.

Usaha pemerintah juga untuk mendorong pertumbuhan ekonmi yang ada di Indonesia serta usaha agar terjadinya pemerataan dalam kesenjangan dengan mengadakannya beberapa program yang menyediakan kebutuhan pangan, memberikan makanan dengan uppaya untuk memebrikan peningkatan gizi, pemberian pelayanan-pelayanan kesehatan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, memberikan program keluarga berencana, memberikan program pendidikan dasar, memberikan program air bersih, serta memberikan program pembanguna rumah secara sederhana.

Dengan pelaksaan strategi tersebut yang dilaksanakan secara konsekuen di seluruh wilayah secara merata, dengan adanya program dyang diakana setidaknya penduduk yang ada di Indonesia mengalami penurunan hingga mencapai angga 25% dari 20% di thun 1970. Adapun pendapatan yang masyarakat dapatkan dilihat dari kapitanya naih hingga 70 dolar tiap tahunnya di tahun 1968 meningkat hingga 600 dolar setiap tahunnya di tahun 1993.

Peningkatan usaha dan pemerataan ekonomi di masyarakat yang menajdikan hal tersebut sebagai harapaan untuk hidup, dari yang awalnya usia produktif hanya sampai 50 tahun kemudian berubah menjadi 61 tahu yang berubah pada tahun 1992. Dengan jarak waktu yang sama terlihat bahwa angka kematian bayi pada saat itu juga menjadi menurun sehingga angka kehidupan menjadi sebuah harapan bagi kelahiran bayi. Jumlah populasi penduduk yang sudah mulai bisa dikendalikan dengan program yang di laksanakan yaitu program keluarga berencana.

1. Penataan Kehidupan Politik

Dimulainya dengan pemburan partai komuis dan beberpa organisasi sebelumnya yang dimana hal tersebut merupakan sebuah usaha untuk menjadikan sebuah keamanan negara, ketenangan dan stabilitas dalam pemerintahan sebagimana kebijakan yang dikeluarkan oleh supersmar. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyederhanaan sistem perpolitikan yang ada pada saat itu, tahun 1973 kemudian diakannya pemihan umum untuk pertamakalinya yang dimana pemerintah telah melakukan bentuk penyerderhanaan serta pengabungan bebrapa partai politik menjadi tiga kekuatan. Pengabungan tersebut bertujuan dengan sebuah dasar yang dilandaskan pada kesamaan dalam ideology dan mengatas namakan program. Yang diamana dari tiga kekuatan besar tersebut adalah :

a. PPP atau Partai Persatuan Pembangunan yang diaman partai tersebut adalah merupakan gabungan dari NU, Pamursi, PERTI, dan PSII.
b. PDI, Partai Demokrasi Indonesia, yang terdiri dari gabungan PArtai Katoloik, PNI,
c. Murba, Parkindo, dan IPKI.
d. Yang terakhir golongan karya

Upaya pada orda pada masa itu sebgai bentuk penyederhanaan supaya tercipta sebuah kesetabilan dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Sejarah yang dilalui pada pemerintahan yang sebelumnya memberikan banyak pelajaran yang di mana jika perpecahan itu terjadinya akabiat dari adanya perbedaan yang mengatasnakan idologi sehingga terjadilah perbedaan pemaham yang dimana membawa Pancasila sebagi hukum tertinggi.

Di rezim orba ini pemulihan politik luar negri juga dilakukan dengan politik yang bebas aktif. Ketetapan yang dikeluarkan oleh MPR dijadikan sebagai landasan politik luar negri, pelaksanaannya di dasarkan pada sebuah kepentingan nasional seperti dalam halnya pembangunan, kemakmuran untuk rakyat, serta keadilan.

Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB di tahun 1966 keputusan tersebut dilakukan karena kesadaran bahwa banyak manfaat yang di dapatkan oleh Indonesia ketika menjadi bagian dari PBB. Kembalinya Indonesia pun mendapatkan sambutan hanyat oelha negara-negara lainnya serta oleh PPB

sendiri, ditunjuknya Adam Malik sebagiai ketua umum PBB untuk siding tahun 1974, Indonesia memulihkan hubungannya yang sempat renggang dengan negara-negara lainnya yang disebabkan oleh politik dari pemerinthan sebelumnya.

2. Pemulihan Hubungan dengan Singapura

Menggunakan perantara Dubes Pakistan untuk Myanmar, sehingga hubungan Indonesia dengan Singapura dapat dipulihkan. Tanggal 2 juni 1966 Indonesia menyampaikan pengakuan terhadap singapura melalui perdana mentrinya, yang kemudian Singapura juga memberikan jawaban bahwa mereka siap mengadakan hubungan yang baik serta hubungan diplomatic dengan negara Indonesia.

3. Pemulihan Hubungan dengan Malaysia

Perbaikan hubungan dengan Malaysia sendiri diadakan di Bangkok pada 29 Mei sampai 1 Juni 1966 yang memberikan sebuah hasill dengan hasil sebuah perjanjian Bangkok yang dimana Isinya :

a. Memberikan kesempatan menegaskan kembai bagi rakyat Sabah mengenai keputusan yang tlah di ambil dalam Federasi Malaysia.
b. Kedua belah pihak setuju untuk memulihkan hubungan dengan baik.
c. Diberhentikannya tidnakan permusushan antara keduanya.

11 Agustus 1966 persetujuan atara hubungan baiak Indonesia dan Malaysia ditandatangi oleh perwakilan masing-masing yang di selenggarakan di jakarta oleh Adam Malik sebagi perwakilan dari Indonesia dan Tun Abdul Razak sebagi perwakilan dari Malaysia.

4. Pembekuan Hubungan dengan RRT

1 Oktober 1967 Indonesia melakukan pembekuan hubungan secara diplomatic terhatap Tiongkok . hal tersebut dilakukan katena TIongkok sudah dengan berani mencampuri urusan rakyat Indonesia yang diamana Tiongkok memberikan bantuan terhadap Gerakan 30 September dalam melaksanakan pemeberontakannya.indonesia merasa sangat kecewa karena orang-orang China melaukan sebuah terror di gedung kedutan bersar Republik Indonesia.

Perintah Tiongkok malah memberikan perlindungan terjhadap orang-orang yang terlibat dalam Gerakan 30 September yang ada di luar negri dan mendukung bangkitnya partai Komunis yang ada di Indonesia.

5. Kapabilitas Sistem Politik Rezim Orba

Dikatan dalam sebuah artikel yang berjudul "Warisan Buruk Orde Baru" disana ditulliskan bahwasanya pemerintahan pada era orde baru ini merupakan sebuah sistem politik yang dibangun berlandaskan pada otoriterisme. Yang dimana pada era tersebut lembaga-lembaga pemerintahan dan organisasi-organisasi yang ada pada sistem pemerintahan di kekang dan pengang kendalinya oleh presiden Soeharto beserta jajarannya yang memegang tahta tertinggi dalam pemerintahan pada saat itu.

Pada pemerintahan di era orde baru ini memiliki sebuah kapabilitas yang ekstraktif yang cukup besar. Di tahun 1993 Indonesia sendiri pernah diberikan sebuah pujian dari bank dunia yang dimana mengatakan bahwa "Indonesia sebagai East Asian Miracle" karena pada saat itu Indonesia mengali peningkatan dalam penumbuhan ekonomi yaitu pencapaian yang sebesar 7%. Sehingga dengan pencapaian tersebut Indonesia mendapatkan sebuah julukan yang berbunyi "Macan Asia Baru" karena menjadi salah satu yang mengalami sebuah sumber kekuatan yang baru setelah Taiwan, Malaysia, Singapura dan Korea Selatan.

Rezim di era orde baru ini memiliki sebuah kemampuan yang diaman mampu mengelola berbagai sumber-sumber yang ada di Indonesia secara ekstraktif. Yang dimana membangun berbagai sektor seperti infrastruktur dalam dunia pertanian, pertambangan, beserta yang lainnya yang bisa sebagai sumber yang memang bisa di manfaatkan denganbaik. Juga pada era ini membangun sunber-sumber materiil yang bisa di ekspor secara internasisonal.

Rezim orde baru ini memiliki sebuah kelemahan dan bahkan mungkin sangat disayangkan, karena pada rezim ini tidaknya disertai oleh kemampuan secaraa distributif.Karena pada saat itu proses pembangunan yang terjadi tidaklah membawa sebuahkemakuran mellainkan membawa permasalahan, yang diantaranya:

a. Semakin terlihatnya perbedaan anatara yang miskin dengan yang kaya

b. Terjadinya kesenjangan baik anatara di daerah mapun di pusat
c. Adanya kesenjangan secara regional
d. Kesenjangan yang berupa sebuha investasi ataupun kesenjangan yang berbentuk sosial

Sangat kentara terlihat, salah satu contohnya pada saat pembangunan secara difiik terutama pembangungan yag ada di daerah jawa. Bisa dikatakan bahwasanya rezim pada masa orde baru ini telah memiliki sebuah kapabilitas yang baik dalam bentuk kapabilitas simbolik. Pada masa itu para elit politik membuat desian kapabilitas simboliknya dengan sangat baik yang dimana masyarakatnya bisa yakin dan percaya bahwa proses pemabngunan pada masa itu telah berhasil. Mereka melakukannya dengan cara seremonila untuk menarik perhatian dari masyarakat, yang diantaranya:

a. Mereka memberikan sebuah kesan agar masyarakat memaknai bahwasanya Presiden Soeharto merupakan bapak pembangunan, karena tentu saja diatakan dia tas bahwa mereka melakukannya dengan cara seremonila yang dimana presiden Soeharto selalu datang dalam acara seremonila kertika pembangunan presemian proyek.
b. Memberikan sebuha kesan kepada masyarakat bahwasanya presiden Soeharto sendiri dahulunya merupakan seorang anak petani yang kemudian pada masa itu diangkat mejadi seorang presiden, dengan demikian memberikan kesan bahwa perhatian presiden akan fokus kepada para petani yang dimana beliau selalu hadir pada saat acara panen besar di beberapa daerah. Beliu juga memberikan beberapa kebijakan terhadap para petani padi dengan memberikan subsisdi pupuk, memberikan bantuan kredit kepada para petani, dan masih banyak kebijakan yang lainnya.
c. Memberikan kesan bahwa mereka dekat dengan rakyat, dyang dimana mereka turun langsung kepad masyarakat dan mengajak masyarkat ituk berdialog bersamanya sehingga memberikan kesan bahwasanya presiden Soeharto dan para elit politiknya dekat dengan semua kalangan dan lapisan masyarakat.

d. Memberikan kesan bahwasanya presiden Soeharto sendiri peduli terhadap lingkungan hidup, maka beliau selalu mengadakan penyerahan hadiah di istana negara.

5. Agar terlihat semakin baik presiden Soeharto, beliau mempertontonkan kekuatan kemilititerannya melalui acara parade yang dilakukan oleh para militer.

Adapun pengptimalan secara regulative pada rezim orde baru yaitu adanaya satabilitas dalam pembangunannya, tetapi ada beberapa yang bertentangan dengan demokrasi dari kebijakan-kebijakan yang diabuatnya, diantaranya :

a. Adanaya pengontrolan secara ketat terhadap masyarakat yang dimana hal tersebut dilakukan supaya msayarakat tidak membangkang terhadap kebijakannya. Aktivitas secara individu maupun kelompok dilakukakn pemantauan secara ketat, organisasi yang tidak sejalan di bubarkan, media yang mengkritik pemerintah di bungkam politikus yang mengkritisasi juga di bungkan bahkan parahnya ada yang sampai dihilangkan.
b. Memberikan batasan kepada masyarakat pedesaan terhadap aktivitas politik, kebijakan pada masa ini disebut dengan kebijakan “the floating mass” yang dimana pemabatasan dalam kegiatan politik dari masyarakat pedesaan yang kemudian mereka fokuskan pada pembangunan nasional. Untuk penampungan aspirasi masyarakat pedesaan tersebut, pemerintah memberikan fasilitas melalui organsadi-organisasi yang mereka bentuk sendiri, sehingga masyarakat pedesaan tidak bisa ikut andil langsung dalam politik.
c. Terjadinya pembatasan dalam kebijakan politik sehingga organisasi-organisasi politik yang ada kebebasannya berkurang, tetapi di sisi lain ada rezim orba ini meningkatkan peran Golkar untuk menggalang kegitan masyarakat yang ada di pedesaan. Dengan kata lain masyarakat dibatasi dala kegiatan politiknya.

Adapun kapabilitas dalam bentuk responsif yang terjadi pada masa rezim orba ini memiliki sifat otoritas bisa di simpulkan pada bentuk

kapabilitas yang satu ini merupakan bentuk yang paling buruk. Kurangnya masukan dari masyarakat tetapi malah mendpatkan perhatian besarnya dari para elit politik dan para militer.

Nah bisa dikatakan kebijakankebijakan yang keuar pasa masa itu lebih berpihak kepada elit politik disbanding dengan apa yang di inginkan oleh masysrakatnya, seperti kita ketahui juga bahwasanya kenbijakan politik masyarakat memang di batasi dan di perhatikan terutama bagi para masyarakat yang ada di pedesaan, kebutuhan masyarakat sendiri tidak terpenuhi bahkan mungkin biasa dikatakan apa yang memang seharusnya menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri fungsinya menjadi mati suri.

Dalam kekuatan kapabilitas di bagian luar negrinya bisa di katakan pada masa orba itu memang mengalami kelemahan, yang diantaranya :

a. Sistem politik yang tidak mampu mengahdapi tekanan global dalam mengahdapi ekonomi yang dilaksanakan secara liberal dengan perdagangan dan keuangan, yang melakukan privitalisasi terhadap perusahaan publik.
b. Regulasi yang mengalihkan peran negara sebai peran penentu suatu kebijakan.
c. Indonesia terpaksa harus tunduk dan mengikuti keinginan IMF, yang dimana Indonesia harus mengikuti dan mematuh 13 persayaratan pembahruan meliputi restrukturisasi korporasi,privstidsdi, perkayuan, tekstik dan msih banyak lagi yang harus di patuhi oleh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Backley, W. (1967). *Sociology And Modern Systems Theory.* Prentice Hall.

Badrun, U. (2016). *Sistem Politik Indonesia: Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Baghi, F. (2021). *Kapabilitas Sistem Politik Sebagai Parameter Keberhasilan Suatu Pemerintahan*, 20(01), 52.

Budiana, M. (2014). *Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia*, 13(01), 107-109

Budiarjo, M. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dedi, A. *Kapabilitas Sistem Politik Sebagai Parameter Keberhasilan Suatu Pemerintahan*, 10-11.

Dr. Sahya Anggara, M. (2013). *Sistem Politik Indonesia.* Bandung: CV. Pustaka Ceria.

Fadli, A. M. (2017). *Buku Ajar Politik Indonesia.* Sleman: DEEPPUBLISH.

Felix Baghi, *"Narasi Diri, Yang Lain dan Institusi Yang Adil: Hermeneutika Diri dan Etika Politik Paul Ricoeur, Jurnal Ledalero*, vol. 11, no. 1, 2012, hal. 53-80.

Gaffar , Affan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*

Goodman, G. R. (2011). *Teori Sosiologi.* Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Harnawansyah, M. F. (2019). *Sistem Politik Indonesia.* Surabaya: Scopindo

Media Pustaka.

Kantaprawira, R. (2004). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar.* Bandung: Sinar BAru Algensindo.

Paul Ricoeur, *"Life in Quest of Narrative," dalam David Wood (ed.), On Paul Ricoeur: Narrative and Interpretation, (London: Routledge, 1991)*, hal. 20

Prawiro, M. (2018, November 18). Pengertian Sistem: Definisi, Unsur-Unsur, dan Jenis-Jenis Sistem. Retrieved from pengertian-sistem: *https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-sistem.htm*

Silahudin. 2011. *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Kultur dan Struktural Fungsional. Bandung: Kelir.*

BIOGRAFI PENULIS

Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si. Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Doktorandus {Drs}. Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan Maret tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen magang di almamaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya "Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan" dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu, : Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi Jurnalistik,Hubungan Masyarakat, Bimbingan Konseling Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar, workshop, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah dari kolaborasi terhadap penugasan pada mahasiwa Komunikasi penyiaran Islam semester enam dan mahasiswa jurnalistik semester empat tahun 2022 bekerjasama dengan dosen pengampu Mata Kuliah Sistem politik Indonesia Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tentu saja, amat di sayangkan bila hasil dari penelitian mahasiswanya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia itu ditambah kebaikan dari fihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu : Komunikasi Politik : Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 di terbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu : Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang Banyumas. Buku ke 3, yaitu Komunikasi Kebijakan Pendidikan di terbitkan oleh Jakad Media Surabaya pada tahun 2021. Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdi selama ini. Ada juga tulisannya yang telah terbit di jurnal internasional. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada akun Google Cendikia : Cecep Suryana. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di posting pada akun face book dengan alamat cecep suryana majalengka dan akun instagram dengan alamat @csuryana56.

Keukeu Eva Fitriani, Lahir di Garut pada 23 Juli di tahun baik. Perempuan kelahiran garut yang akrab dengan nama sapaan keukeu atau epa ini memiliki hobi membaca dan menggambar. Ia memiliki sebuah cita-cita untuk memiliki peternakan T-rex di masa depan, meskipun dia tidak terlalu memberatkan harapan untuk cita-citanya terkabul karena ia takut hal tersebut memberatkan bumi. Saat ini ia menetap di Cibiru untuk menempuh pendidikan sarjananya. ia merupakan seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan mengambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Fanny Muhammad Ikhsan, Lahir di Cianjur tanggal 22 Januari 2001 SD ibu jenab 2 smpn4 Cianjur sman2 Cianjur tinggal diBTN Griya Maleber indah hobi bermusik juara 2 parade band juara 3 festival band polres dll orang nya pendiam.

Haekal Rasyad Nurhakim, bertempat lahir dibandung, 21 oktober 2001. Pendidikannya dimulai di daerah banten dengan menamatkan 6 tahun pembelajaran di Sekolah Dasar Terpadu Banten. Lulus dengan predikat sangat baik dalam akhlak dan disiplin memantik penulis untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke Sekolah Menengah Terpadu Sukabumi selama 3 tahun. Kemudian pendidikan berlanjut ke Sekolah Menengah Atas Negeri Cijerah Bandung selama 3 tahun. Hingga sekarang sedang berkuliah semester 6 pada jenjang strata satu di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam perjalanan pendidikan yang dilalui penulis banyak belajar tentang kehidupan dan lika-likunya. Memiliki hobi olah raga menyempatkan penulis bergabung dengan klub Wushu Perguruan Golden Dragon Team dan berhasil menjuarai beberapa medali dan sertifikat perguruan antar provinsi. Hobi lainnya disematkan pada tennis meja, healing, membaca berita, hingga hobi buat video dan fotografi. Diantara tulisan yang pernah dibuat : "Jika Pandemi Pergi, Anak Mulai Bisa Kembali Bersekolah", "Ada Apa Dengan Kekerasan Seksual Di Indonesia", "Membangun Ekonomi Atau Menindas Ekosistem Alam". Dan masih banyak lainnya pada blog Haekal Bloginfo.

Dimas Taufik Saputra, lahir di Lampung pada 20 Desember tahun 2000,

pendidikan dimulainya dari TK yang berada di lampung, lalu melanjutkan pendidikan SD, MTS, dan SMA di Tangerang, setelah lulus SMA, ia melanjutakan pendidikan nya di Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung dengan mengambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Memiliki hobi Olahraga yang dibilang cukup ekstrim yaitu Parkour, olahraga ini cukup berbahaya dan tidak semua orang bisa melakukannya, hobi lainnya yaitu menyanyi dan memainkan alat musik.

Nama Saya Indi Augi Naufal, seorang mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam semester VI (6) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang sedang menempuh pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Saya berasal dari Kabupaten Tasikmalaya tepatnya di Kampung Kebon Salak Desa Singaparna Kecamatan Singaparna. Saya merupakan anak ke tiga dari 2 bersaudara dari pasangan Suami Istri yang bernama Iyus Yusuf dan Ucu Sumawati.

Kegiatan yang saya sukai ialah berorganisasi, disanalah saya bisa mengembangkan serta mengasah skill atau kemampuan dalam hidup pribadi untuk bekal di masa depan nanti. Dengan organisasi pula saya mempunyai banyak relasi dan mampu belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik terhadap banyak orang yang tentunya memiliki berbeda-beda sifat setiap individunya. Maka dari itu kegiatan yang saya jalani ialah berorganisasi aktif baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan bermasyarakat.

Nama saya Hasby Hidayatul, biasanya akrab dipanggil Hasby. Saya lahir di Bandung, 26 September 2000, Saya anak kedua dari empat bersaudara, Ayah saya bernama KH.Asep Hidayat M,Sos dan Ibu saya bernama Sunarsi S,Ag . Ayah saya adalah Pencerah sekaligus KUA di sumur bandung dan Ibu saya Guru Sekolah Mts. Pada saat saya umur 5 tahun Saya memulai karir pendidikan di jenjang PAUD UIN Bandung yang berada dikota Bandung, dan setelah saya di TK saya melanjutkan di SDN Cipadung 01 yang berada di kota Bandung. jenjang SD dan mendapatkan ijasah. saya melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu Pondok Pesantren Al-falah Cicalengka sama di Mts, Saat Mts Saya bersekolah di Mts Al-falah Cicalengka yang berada di Kota Bandung, tepatya, Di Mts saya menimba ilmu selama 3 tahun lamanya, menyelesaikan pendidikan di Mts dan saya mendapatkan izajah Mts. kemudian di lanjutkan kejenjang berikutnya yaitu di Pondok Pesantren Sukamanah dan di SMA KHZ MUSTHAFA Tasikmalaya atau yang biasa di sebut SMA KHZ yang berada

di Kota Tasikmalaya disitulah Saya mengenakan seragam putih abu-abu dan menuntut ilmu selama 3 tahun, di SMA KHZ ini Saya dibentuk menjadi seorang siswa didik yang diharapkan mampu memimpin ummat dan memiliki bidang professi yang dapat menjadi bekal bagi saya nantinya adapun jurusan saya adalah jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dan di sini juga saya belajar semua yang ada seperti Belajar Bhs Arab dan Inggris bahkan Belajar bahasa Jepang, bahasa tersebut di wajibkan dalam kehidupan sehari-hari, banyak perubahan sikap yang saya rasakan selama belajar di SMA KHZ dan mental menjadi lebih luar biasa dan tentunya semakin dewasa. Setelah saya menyelesaikan pendidikan SMA KHZ, melanjutkan pendiidikandi Universitas Islam Negri Bandung (UIN) Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Kota Bandung, dan sekarang pun saya menuju tingkat 3. Semoga saya dapatkan bisa dipertanggung Jawabkan, agar kedepannya bisa sukses membahagiakan kedua Orang tua dan Berguna Untuk Negara. Amin ya Rabbalalamin.

Ginan Giasul Mustagisin Lahir di Bandung pada tanggal 22 Oktober tahun 1998, Pendidikan dimulainya dari SD yang berada di Bandung Barat yaitu SDN Citalem, lalu melanjutkan SMP Negeri 1 Cipongkor dan SMA Muslimin Cililin, setalah lulus SMA Ia melanjutkannya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan mengambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.Memiliki hobi olahraga yaitu bermain futsal, dan juga memiliki hobi traveling.

Pahlawan Nasional Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

ISBN 978-623-88132-2-3 (PDF)